

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Oto Iskandar Dinata, Lingkar Selatan-Benteng

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif .

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, mengacu kepada RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024, dan memperhatikan Renstra Kementerian Perhubungan RI tahun 2015-2019, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Ciamis.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih belum sempurna, maka apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan dapat dilakukan perubahan.

Ciamis, September 2019

Plt. KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS



Drs. ENDANG SUTRISNA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19600903 198203 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud Dan Tujuan.....	4
D. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	8
A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.....	8
B. Sumber Daya Dinas Perhubungan.....	21
1. Sumber Daya Manusia.....	21
2. Sarana Dan Prasarana Kantor.....	24
C. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	27
1. Kinerja Pelayanan Bidang Perhubungan.....	27
2. Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....	37
D. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.....	41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN	43
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perhubungan.....	43
B. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	45
1. Visi.....	45
2. Misi.....	46
C. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.....	50

	1. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan.....	50
	2. Telaahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.....	58
	D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup.....	59
	1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	59
	2. Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	62
	E. Penentuan Isu Strategis.....	63
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	65
	A. Tujuan.....	65
	B. Sasaran.....	65
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	A. Strategi.....	69
	B. Arah Kebijakan.....	69
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	72
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERHUBUNGAN	90
BAB VIII	PENUTUP	98

DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL II.1	: Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan Formal	21
TABEL II.2	: Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Golongan	21
TABEL II.3	: Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian	22
TABEL II.4	: Jumlah Jabatan Struktural Tahun 2019 Periode Bulan September.	22
TABEL II.5	: Jumlah Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2019	23
TABEL II.6	: Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Perhubungan Tahun 2019	23
TABEL II.7	: Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop ...	24
TABEL II.8	: Jumlah Perlengkapan Kantor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis	26
TABEL II.8	: Jumlah Peralatan Kantor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis	26
TABEL II.10	: Lokasi Kegiatan Pengadaan Traffic Light	28
TABEL II.11	: Data Terminal Angkutan Jalan di Kabupaten Ciamis	30
TABEL II.12	: Lokasi Halte/Shelter	32
TABEL II.13	: Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2018	35
TABEL II.14	: Rasio Realisasi Anggaran dan Pendapatan Terhadap Target	39
TABEL II.15	: Jumlah Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi Keuangan Selama 5 Tahun Terakhir	40
TABEL III.1	: Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	49
TABEL III.2	: Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	53
TABEL III.3	: Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah	62
TABEL IV.1	: Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024	66
TABEL IV.2	: Tabel Tujuan dan Sasaran Beserta Target Indikaor Tahun 2019- 2024	67

TABEL V.1	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan terhadap Visi Misi RPJMD	70
TABEL VI.1	: Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif Tahun 2019-2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis	77
TABEL VII.1	: Target Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024	91
TABEL VII.2	: Target Pencapaian SM Tahun 2019-2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis	94
TABEL VII.3	: Target Capaian Indikator Kinerja Program Bidang Perhubungan Tahun 2019-2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis	96
TABEL VII.4	: Target Indikator Kinerja Kunci Bidang Perhubungan di Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024	97

DAFTAR GAMBAR	Halaman
GAMBAR I.1 : Flowchart Penyusunan Rancangan Rencana Strategis	2
GAMBAR II.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis	20
GAMBAR II.2 : Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2019 (Periode Bulan September	22
GAMBAR II.3 : Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas yang Sudah Dipasang	28
GAMBAR II.4 : Perbandingan Jumlah Penerangan Jalan Umum yang Dipelihara ..	29
GAMBAR II.5 : Perbandingan Jumlah Halte	31
GAMBAR II.6 : Perbandingan Jumlah Alat Uji yang Berfungsi	33
GAMBAR II.7 : Jumlah Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	37
GAMBAR II.8 : Data Perkembangan Capaian Realisasi PAD	37
GAMBAR II.9 : Perbandingan Jumlah Alokasi Anggaran Selama 5 Tahun Terakhir	38
GAMBAR II.10 : Perkembangan Capaian Realisasi Keuangan Selama 5 Tahun	38
GAMBAR III.1 : Prosentasi Penyebab Kecelakaan dari Faktor Manusia	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif.

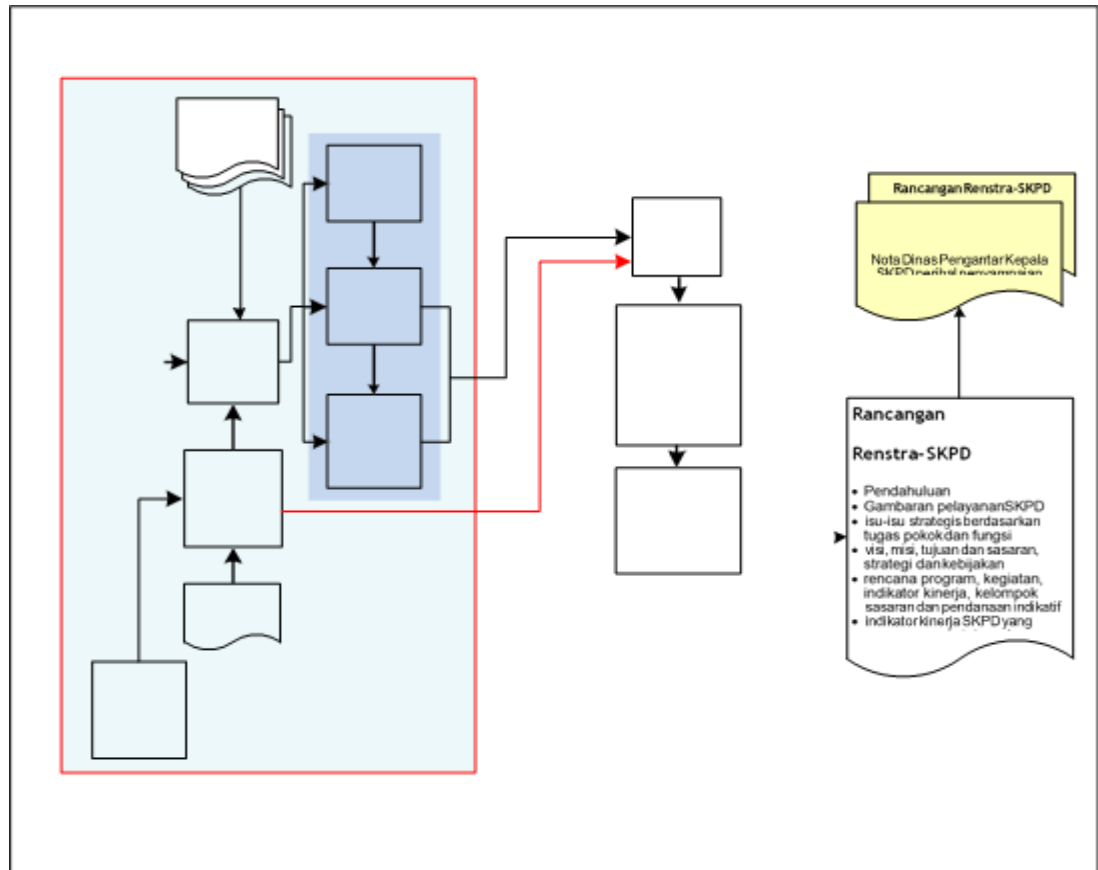
Proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis meliputi : (1) Persiapan penyusunan Renstra, (2) Penyusunan Rancangan Renstra, (3) Penyusunan rancangan akhir Renstra dan (4) penetapan Renstra.

Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, dokumen RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 dengan memperhatikan Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tahun 2015-2019, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Ciamis.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2019-2024. Selain itu Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.

Berikut flowchart tahapan penyusunan rancangan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis :

Gambar I.1
Flowchart Penyusunan Rancangan Rencana Strategis



B. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan atau dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
25. Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perhubungan;

C. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis untuk kurun waktu Tahun 2019 – 2024 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan,

isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Kabupaten Ciamis.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis untuk kurun waktu tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2024.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dan susunan garis besar isi dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, sumber daya Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, serta tantangan dan

peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.

- Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan R.I, telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan isu-isu Strategis.
- Bab IV Tujuan dan Sasaran,
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis tahun 2019- 2024.
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah- kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dan rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS

A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas , Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis mempunyai tugas pokok "membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya"

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tugas pokok dan rincin tugas dari masing- masing jabatan sebagaimana tersebut di atas ditaur dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 tahun 2016 Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Ciamis melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib bidang perhubungan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Dinas;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
- f. penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
- g. penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- l. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis membawahkan :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan perencanaan, program, informasi dan penatalaksanaan hubungan masyarakat serta pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan di lingkungan Dinas. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 - b. penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
 - c. penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
 - d. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
 - f. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
 - g. pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - h. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
 - i. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
 - j. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - k. pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
 - l. pelaksanaan verifikasi keuangan;

- m. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- n. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- o. pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- q. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- b. penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. pengelolaan perlengkapan Dinas;
- e. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset/barang milik daerah lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian angkutan umum dan terminal.

Bidang Angkutan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang angkutan;
- b. perencanaan dan penyusunan rencana pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum;
- c. perencanaan dan penyusunan jaringan trayek angkutan umum.
- d. penyelenggaraan izin angkutan umum;
- e. penyusunan dan evaluasi tarif angkutan umum dan terminal;
- f. penyusunan petunjuk teknis penetapan jenis kendaraan angkutan umum dan batasan maksimum berat kendaraan angkutan umum beserta muatannya pada ruas jalan kabupaten;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis membawahkan:

- 1) Seksi Bina Usaha Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan. Seksi Bina Usaha Angkutan sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemantauan, penyiapan angkutan Umum.

Seksi Bina Usaha Angkutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan izin usaha angkutan umum dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek angkutan umum;

- b. penyelenggaraan pelayanan izin trayek angkutan perdesaan, angkutan kota, angkutan perbatasan dan angkutan khusus yang beroperasi di daerah;
 - c. penyusunan rencana penetapan tarif Angkutan Umum dan Jasa Terminal yang diusahakan oleh pemerintah daerah;
 - d. penyelenggaraan pelayanan izin insidentil dalam trayek;
 - e. pelayanan izin operasi angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan pariwisata, angkutan lingkungan dan angkutan berbasis aplikasi yang beroperasi di daerah;
 - f. fasilitasi pembinaan perusahaan angkutan yang berdomisili di daerah;
 - g. penyusunan pertimbangan teknis/advis teknis permohonan pengalihan kepemilikan perusahaan angkutan dan penggantian kendaraan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan khusus yang berdomisili di daerah;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
 - i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Jaringan Transportasi dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan. Seksi Jaringan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemantauan dan penyiapan jaringan trayek serta perhitungan kebutuhan dan jenis moda angkutan. Seksi Jaringan Transportasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan lokasi terminal penumpang Tipe C;
 - b. fasilitasi pembangunan terminal Penumpang Tipe A, B dan C dan terminal angkutan barang;
 - c. penyusunan jaringan trayek dan alokasi kebutuhan angkutan dalam daerah;
 - d. fasilitasi dan pengoperasian pembangunan terminal angkutan barang;

- e. penyusunan pertimbangan teknis/advis teknis izin trayek Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan khusus asal dan/atau tujuan trayek wilayah dalam daerah;
- f. penyusunan dan perencanaan penetapan jaringan lintas angkutan jalan kabupaten (Barang dan Orang);
- g. penyusunan dan Penetapan Rencana Umum Jaringan Transportasi Kabupaten;
- h. penyusunan perencanaan, pengembangan, pengoperasian dan fasilitasi perizinan angkutan sungai, danau, pelabuhan penyeberangan yang berada di wilayah kabupaten;
- i. perencanaan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan angkutan Umum tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya dalam daerah;
- j. fasilitasi perizinan dan penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- k. fasilitasi penyusunan rencana induk dan penyelenggaraan kereta api khusus dalam daerah;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- m. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perencanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Bidang Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang lalu lintas;
- b. penyusunan rencana penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;

- c. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan fasilitas lalu lintas dan pendukung jalan;
- d. pelaksanaan fasilitasi manajemen dan rekayasa lalu lintas, perairan, perkeretaapian dalam kabupaten;
- e. pelaksanaan penetapan dan pengaturan sistem informasi lalu lintas;
- f. perencanaan dan pelaksanaan penetapan kecepatan maksimum kendaraan;
- g. penyelenggaraan rekomendasi teknis analisa dampak lalu Lintas;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis membawahkan :

1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan dan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas;
- b. penyusunan bahan penetapan lokasi dan penyediaan Perlengkapan lalu lintas;
- c. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perairan, perkeretaapian dalam kabupaten;
- d. penyelenggaraan rekomendasi teknis penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas;
- e. penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di wilayah daerah;
- f. penyelenggaraan pemberian rekomendasi/izin penataan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum serta penyelenggaraan tempat parkir khusus bongkar muat;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis lalu lintas;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;

- i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lalu lintas jalan dan angkutan.

Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan perizinan angkutan umum dan angkutan barang;
- c. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan lalu lintas;
- d. fasilitasi pelaksanaan penyidikan pelanggaran peraturan bidang perhubungan
- e. pelaksanaan pengawasan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan

Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknik sarana, Prasarana perhubungan, penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas serta perbengkelan kendaraan bermotor.

Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang teknik sarana, Prasarana dan keselamatan;
- b. penyelenggaraan pembinaan pengoperasian terminal, stasiun kereta api dan pengujian kendaraan bermotor.
- c. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di bidang teknik sarana, Prasarana dan keselamatan;
- d. penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan keselamatan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- e. fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan operasionalisasi fasilitas pendukung dan penyelenggaraan pelabuhan dan bandar udara;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis membawahi :

- 1) Seksi Teknik Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan. Seksi Teknik Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan teknis sarana dan Prasarana perhubungan.

Seksi Teknik Sarana dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebutuhan teknis, pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana perhubungan;
- b. fasilitasi penyelenggaraan terminal angkutan barang dan penumpang;
- c. penyusunan rencana prototipe dan jenis angkutan umum;
- d. penyusunan rencana rekomendasi penetapan lokasi Bandar udara, pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- e. penyelenggaraan perizinan pembuatan tempat penimbunan kayu, jaring terapung dan keramba di sungai dan danau;

- f. penyelenggaraan perizinan usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
 - g. penyusunan rekomendasi rencana induk Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) dan fasilitasi perizinan pelabuhan sungai, Danau dan Penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan nasional;
 - h. fasilitasi pelaksanaan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
 - j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Teknik Keselamatan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan. Seksi Teknik Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas teknis dan pelayanan umum, pembinaan keselamatan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas.
- Seksi Teknik Keselamatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana di bidang teknik keselamatan;
 - b. penyusunan laporan dan analisis data kecelakaan lalu lintas;
 - c. penyusunan data daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
 - d. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan dalam Daerah ;
 - e. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
 - f. Penyusunan materi bimbingan dan penyuluhan keselamatan lalu lintas;
 - g. pelaksanaan bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis pada pengguna dan penyedia jasa angkutan;
 - h. pelaksanaan sosialisasi ketertiban lalu lintas;
 - i. pelaksanaan pembinaan dan pemberian rekomendasi izin sekolah pengemudi;

- j. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- k. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

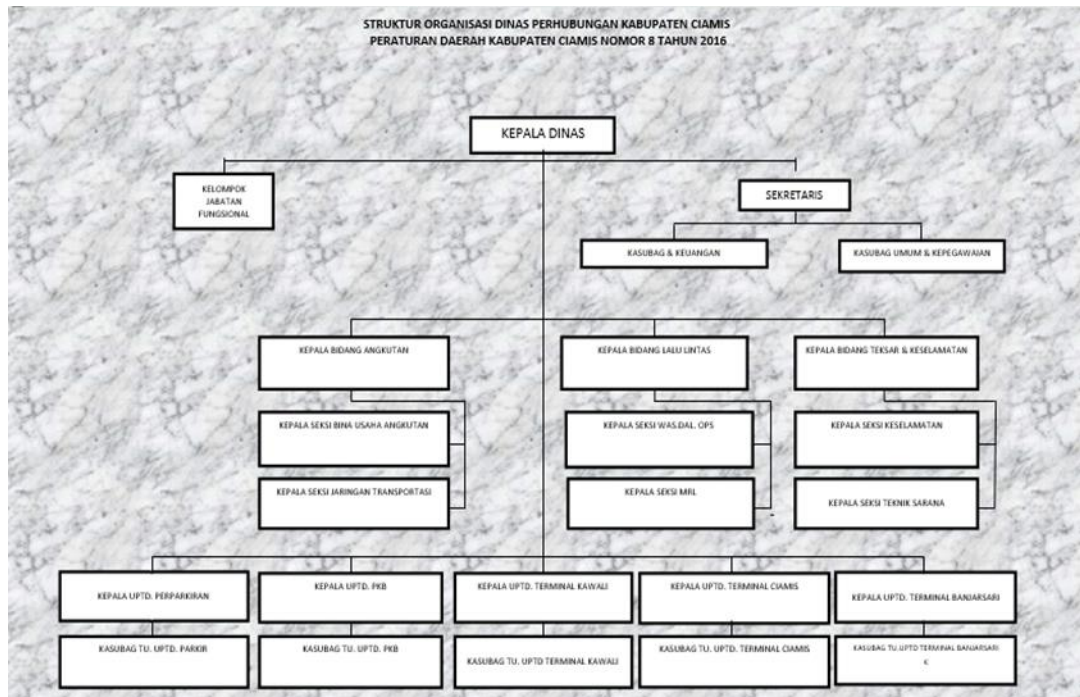
Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
- d. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun struktur organisasi dari uraian tugas masing-masing unit yang telah dijelaskan seperti diatas yaitu :

Gambar II.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten Ciamis



B. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

1. Sumber Daya Manusia

Setiap organisasi tidak terlepas dari unsur manusia sebagai pelaksananya. Pentingnya arti sumber daya manusia adalah mengingat pada bidang tugas yang akan dilaksanakannya. Prinsip *the right man on the right job* sangat diperlukan untuk menciptakan kehandalan dan profesionalisme pegawai. Kualitas sumber daya manusia terkait erat dengan tingkat pendidikan baik formal maupun non formal. Pendidikan formal ditempuh melalui pendidikan sekolah-sekolah, sedangkan non formal ditempuh melalui pendidikan penjenjangan dan kursus-kursus/ diklat teknis bidang Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 86 PNS, dengan rincian seperti pada tabel berikut :

a) Sumber Daya Manusia Menurut Pendidikan Formal

Tabel II.1
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan Formal

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI (ORANG)
1	S-3	-
2	S-2	13
3	S-1/D.IV	15
4	DIII/Akademi	1
5	DII	-
6	DI	-
7	SMA Sederajat	52
8	SMP Sederajat	3
9	SD Sederajat	2
Jumlah		86

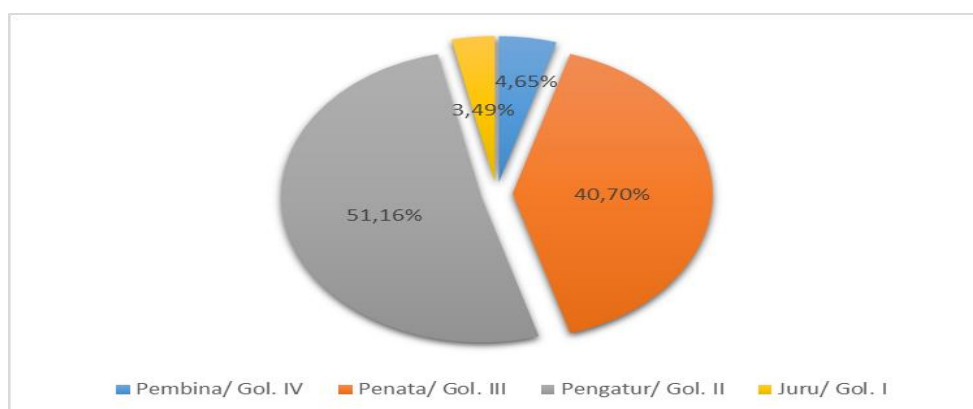
b) Sumber Daya Manusia Menurut Pangkat Dan Golongan

Tabel II.2
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT DAN GOLONGAN	JUMLAH (Orang)	PROSENTASI (%)
1	Pembina/Gol.IV	4	4,65
2	Penata/Gol.III	35	40,70
3	Pengatur/ Gol. II	44	51,16
4	Juru/ Gol. I	3	3,49
JUMLAH		86	100,00

Dari tabel tersebut dapat diilustrasikan komposisi pegawai sebagai berikut :

Gambar II.2
Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2019
(Periode Bulan September)



Dari gambar tersebut jumlah komposisi dominan yaitu pada golongan II.

c) Sumber Daya Manusia Menurut Status Kepegawaian

Tabel II.3
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1	PNS	86
2	NON PNS	129
Jumlah		215

d) Sumber Daya Manusia Menurut Jabatan Struktural

Untuk periode Bulan September Tahun 2019 jumlah jabatan struktural yang ada sebanyak 23 orang namun yang terisi hanya 20 orang, yakni :

Tabel II.4
Jumlah Jabatan Struktural Tahun 2019 Periode Bulan September

NO	JABATAN STRUKTURAL	ADA	TERISI	KETERANGAN
1	ESELON II.B	1	1	Kepala Dinas
2	ESELON III.A	1	1	Sekretaris Dinas
3	ESELON III.B	3	3	Kepala Bidang
4	ESELON IV.A	13	9	Kasi/Kasubag/Ka.UPTD
5	ESELON IV.B	5	5	Kasubag UPTD
JUMLAH		23	19	

e) Sumber Daya Manusia Menurut Jabatan Fungsional

Di Dinas Perhubungan juga terdapat jabatan fungsional yaitu penguji kendaraan bermotor dan ada 4 (empat) orang yang menjabat sebagai fungsional penguji kendaraan bermotor, dengan rincian :

Tabel II.5
Jumlah Penguji Kendaraan Bermotor
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2019

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Penguji Penyelia	1
2.	Penguji Pelaksana Lanjutan	1
3.	Penguji Pelaksana Pemula	2
	Jumlah	4

f) Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat

Tabel II.6
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Perhubungan
Tahun 2019

NO	DIKLAT TEKNIS PERHUBUNGAN	JUMLAH (ORANG)
1.	PPNS	6
2.	Penguji Kendaraan Bermotor	4
3.	Penilai Andalalin	2
4.	Operasional Terminal	30
5.	Penyusunan Program Penyuluhan Keselamatan Transportasi Jalan	30
	Jumlah	72

Dari kelima diklat teknis perhubungan tersebut diatas penyelenggaranya sebagian besar dari Kementerian Perhubungan melalui Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi dan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal.

Selain diklat teknis perhubungan juga ada beberapa pegawai yang telah mengikuti diklat, bimtek atau workshop yang diselenggarakan dari instansi lain maupun dari lembaga pendidikan lainnya :

Dengan jumlah pegawai yang ada, banyak pegawai yang masih belum bisa mengikuti kesempatan untuk mengikuti baik diklat, bimtek maupun workshop karena keterbatasan kompetensi pendidikan minimal sebagai syarat untuk mengikuti diklat dimaksud. Meski demikian dinas tetap berupaya untuk selalu memberi motivasi dan berusaha mengajukan usulan kepada kementerian perhubungan terkait penyelenggaraan *in house training* di Kabupaten Ciamis.

g) Daftar Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop

Tabel II.7
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop

No	Diklat/Bimtek/Workshop	Jumlah (orang)	Penyelenggara
1.	PPD RPJMD	2	BAPPENAS
2.	Penyusunan LAKIP	2	Bagian Organisasi Setda Kab.Ciamis
3.	Pengadaan Barang Dan Jasa	2	UNSOED
4.	Aplikasi SIPKD	2	BPKD
5.	Monevis	1	Bagian Pembangunan Setda Kab. Ciamis
6.	e-Planning	2	BAPPEDA
7.	Akrual Basic	1	BPKD
	Jumlah	12	

2. Sarana Dan Prasarana Kantor

a) Kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan dinas jabatan pada Dinas Perhubungan tahun 2018 sebanyak 8 (delapan) unit yang terdiri dari kendaraan roda 4. Jumlah kendaraan dinas jabatan dibandingkan tahun 2017, tidak mengalami perubahan (tetap).

Kendaraan operasional tahun 2018 sebanyak 30 (tiga puluh) unit yang terdiri dari 24 (dua) unit kendaraan roda 2, 4 (empat) unit kendaraan roda 4, 2 (dua) unit kendaraan roda 6.

b) Gedung Kantor

Kantor Dinas Perhubungan saat ini menempati bangunan yang memang sudah disediakan untuk kantor Dinas Perhubungan dengan lokasi ideal berdekatan dengan unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Sedangkan gedung kantor lainnya berupa terminal yaitu :

- Gedung Kantor UPTD Terminal Ciamis, Terminal Ciamis dan UPTD Parkir yang terletak di Jl. Letnan Samuji Ciamis;
- Gedung Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang terletak di Komplek Dinas Perhubungan Jl. Otto Iskandardinata Lingkar Selatan-Benteng Ciamis;
- Gedung Kantor Terminal Sindangkasih yang terletak di Komplek Pasar Sindangkasih;
- Gedung Kantor Terminal Pamokolan Jalan Raya Cihaurbeuti;
- Gedung Kantor Terminal Panumbangan terletak di Jalan Raya Panumbangan-Panjalu;
- Gedung Kantor Terminal Panjalu terletak di kompleks pasar Panjalu;
- Gedung Kantor Terminal Cisaga terletak di Komplek Pasar Cisaga Jalan Raya Banjar – Ciamis;
- Gedung Kantor Terminal Cibeureum terletak di Jalan Cibeureum-Sukamantri;
- Gedung Kantor Terminal Cimaragas terletak di Jalan Raya Cimaragas – Banjar;
- Gedung Kantor Terminal Kawali terletak di Komplek Pasar Kawali;
- Gedung Kantor Terminal Rancah terletak di kompleks pasar Rancah.

c) Perlengkapan Kantor

Perlengkapan kantor yang ada perlu diperbaharui, mengingat ada beberapa meja dan kursi yang rusak berat. Namun sebagian besar masih dalam kategori cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan kerja pegawai. Dibawai ini kami sajikan jenis perlengkapan kantor yang ada dengan kondisinya .

Tabel II.8
Jumlah Perlengkapan Kantor Pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Ciamis

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	RUSAK
1	Brankas	2	1	1
2	Mesin Absensi	1	1	0
3	Kursi Besi/Material	3	3	0
4	Meja Kayu	3	3	0
5	Sice	4	4	0
6	Meja Rapat	14	14	0
7	Meja Tulis	42	28	14
8	Kursi Rapat	47	32	15
9	Kursi Tamu	2	2	0
10	Kursi Putar	21	15	6
11	Kursi Lipat	69	47	22
12	Meja Komputer	4	4	0
13	Sofa	2	2	0
14	Kursi Kerja	7	7	0
15	Mesin Potong Rumput	2	0	2
16	Tempat Sampah	3	3	0
17	Lemari Es	2	2	0
18	AC	13	11	2
19	Alat Pendingin (AC Split)	4	4	0
20	Kipas Angin	12	7	5
21	Kompor Gas	1	1	0
22	Tabung Gas	1	1	0
23	Dispenser	4	3	1
24	Microphone	2	2	0
25	Microphone Table Stand	11	4	7
26	Microphone/Wireless Mic	5	3	2
27	Stand Microphone	2	2	0
28	Tangga Aluminium	2	0	2
29	Mesin Jilid	1	0	1
30	Faximil	1	1	0
31	Screen	1	1	0

Dari jumlah perlengkapan kantor tersebut tentunya perlu adanya penambahan perlengkapan kantor lainnya seperti genset, mengingat

kantor Dinas Perhubungan memiliki daya listrik yang tinggi serta perlunya meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

d) Peralatan Kantor

Peralatan kantor yang ada sementara cukup memadai namun perlu adanya peningkatan baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Dibawah ini peralatan kantor yang menunjang pelaksanaan tugas dan tanggungjawab para pegawai seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel II.9
Jumlah Peralatan Kantor Pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Ciamis

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	RUSAK
1	Kursi Kerja Pegawai	30	26	4
2	Kursi Kerja Pejabat	33	23	10
3	Meja Kerja	16	16	0
4	Meja Biro	45	31	14
5	Lemari Besi	15	11	4
6	Filling Besi/Metal	13	10	3
7	Lemari Kaca	4	4	0
8	Lemari Kayu	6	4	2
9	PC Unit/Komputer PC	24	11	13
10	Laptop	13	10	3
11	Printer	26	16	10
12	Proyektor+attachment	3	2	1
13	Camera	4	4	0

C. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

1. Kinerja Pelayanan Bidang Perhubungan

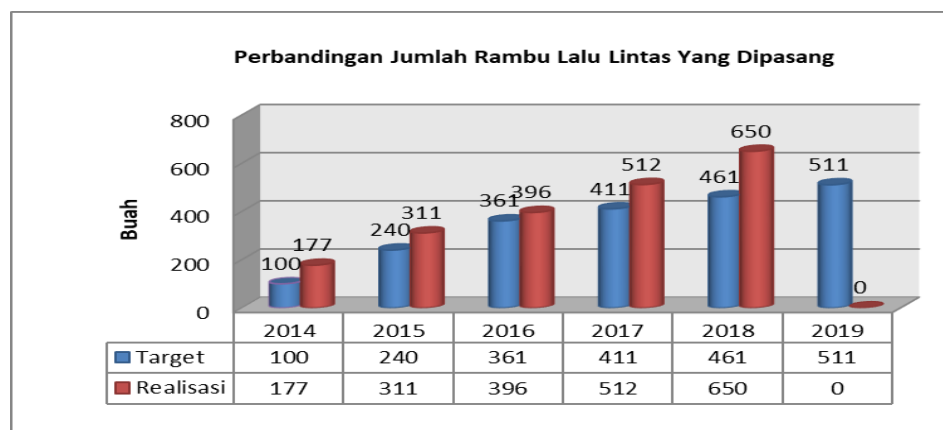
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis telah melaksanakan beberapa kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, melaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, melaksanakan kampanye keselamatan jalan, menyelenggarakan pelayanan perizinan angkutan penumpang umum, menyelenggarakan pelayanan di terminal dan melaksanakan pengawasan operasional kendaraan angkutan penumpang umum baik di ruas jalan maupun di terminal.

Data capaian kinerja pelayanan bidang perhubungan diukur berdasarkan target dan realisasi pada Rencana Strategis Tahun 2014-2019 sebagai berikut :

a) Jumlah Rambu-rambu lalu lintas Yang Sudah Dipasang

Hasil capaian dari tahun awal capaian renstra tingkat capaiannya tiap tahun mengalami peningkatan selain karena memang adanya kegiatan penambahan fasilitas keselamatan baik yang didanai oleh APBD Kabupaten juga adanya tenaga teknis dari Kementerian Perhubungan. Capaiannya dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar II.3
Jumlah Rambu-rambu Lalu Lintas Yang Sudah Dipasang



Sumber : Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Tahun 2019, diolah.

b) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

1) Traffic Light

Tabel II.10
Lokasi Kegiatan Pengadaan Traffic Light

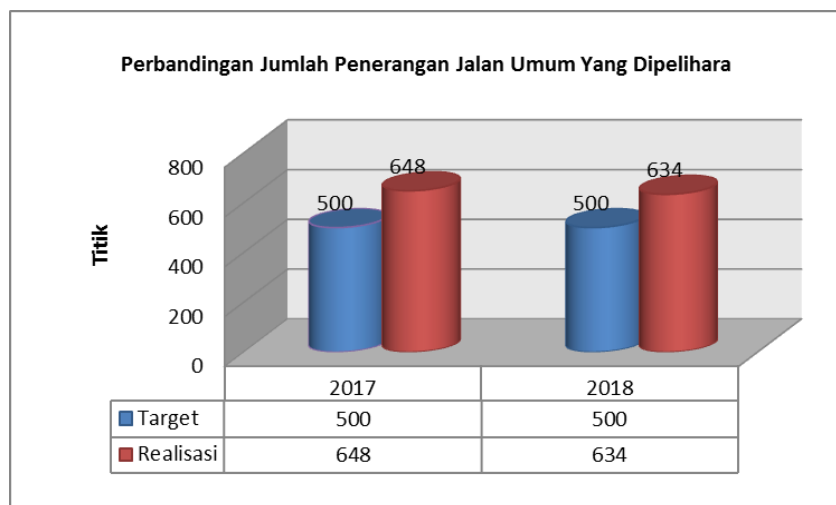
NO	Lokasi	Volume	Status Jalan
1	Simpang 4 Sudirman	1 Simpang	Nasional
2	Simpang 4 Juanda	1 Simpang	Nasional
3	Simpang 3 Ahmad Yani	1 Simpang	Nasional
4	Simpang 4 Yos Sudarso	1 Simpang	Nasional
5	Simpang 4 Rumah Sakit	1 Simpang	Nasional

NO	Lokasi	Volume	Status Jalan
6	Simpang 3 Alun-alun Ciamis	1 Simpang	Nasional
7	Simpang 3 Martadinata	1 Simpang	Nasional
8	Simpang 3 Pahlawan	1 Simpang	Nasional
9	Simpang 4 Tonjong	1 Simpang	Nasional
10	Simpang 4 Lokasana	1 Simpang	Nasional
11	Simpang 4 Cihaurbeuti	1 Simpang	Nasional
12	Simpang 3 Sindangkasih	1 Simpang	Nasional
13	Simpang 4 Cirahong	1 Simpang	Prioritas Provinsi

c) Penerangan Jalan Umum

Jumlah penerangan jalan umum yang dipelihara menurut laporan hasil pelaksanaan kegiatan terdapat 643 titik yang dipelihara dilokasi yang tersebar di seluruh kabupaten Ciamis. Rincian perbandingan terhadap pemeliharaan penerangan jalan umum digambarkan pada grafik dibawah ini :

Gambar II.4
Perbandingan Jumlah Penerangan Jalan Umum
Yang Dipelihara



Capaian tahun ini lebih sedikit dari tahun sebelumnya, karena pekerjaan pemeliharaan penerangan jalan umum tentunya mengikuti keluhan dari masing-masing titik cahaya.

Untuk tahun ini banyak usulan perbaikan terhadap penerangan jalan umum namun tenaga teknis lapangan dalam menentukan perbaikan berdasarkan skala prioritas dan tingkat urgensi. Sehingga untuk tahun ini lebih difokuskan pada perbaikan secara optimal sampai dengan lampu menyala dibandingkan dengan mengejar jumlah titik yang banyak dengan penggantian *spare part* pju yang sama ke beberapa titik namun pju tidak pada status menyala.

Meski demikian baik tahun lalu dan sekarang realisasinya melebihi target yang ditentukan dengan capaian tahun ini sebesar 126,80%.

d) Terminal

Fasilitas perhubungan di Kabupaten Ciamis terdiri dari terminal dan halte. Jumlah lokasi terminal dan halte di Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.11
Data Terminal Angkutan Jalan Di Kabupaten Ciamis

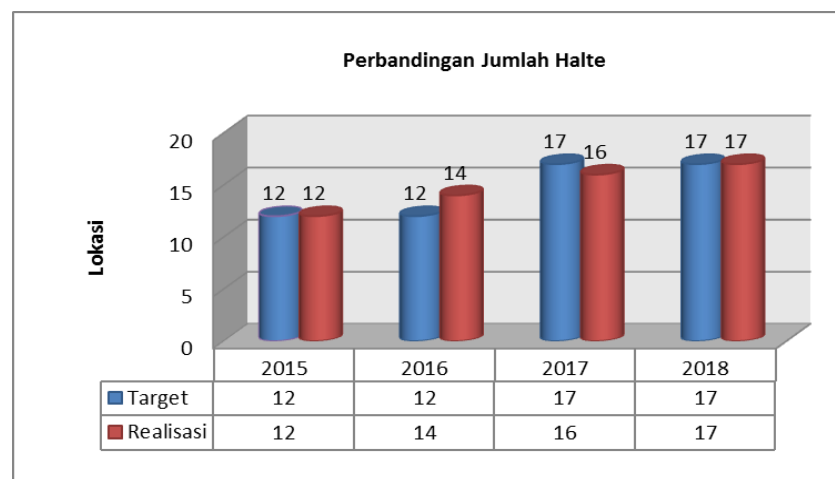
NO	NAMA TERMINAL	TIPE	LOKASI	KONDISI
1	Terminal Ciamis	C	Kec. Ciamis	Baik
2	Terminal Cisaga	C	Kec. Cisaga	Baik
3	Terminal Cimaragas	C	Kec. Cimaragas	-
4	Terminal Sindangkasih	C	Kec. Sindangkasih	Baik
5	Terminal Pamokolan	C	Kec. Cihaurbeuti	Baik
6	Terminal Panumbangan	C	Kec. Panumbangan	-
7	Terminal Kawali	C	Kec. Kawali	Baik
8	Terminal Rancah	C	Kec. Rancah	Baik

NO	NAMA TERMINAL	TIPE	LOKASI	KONDISI
9	Terminal Panjalu	C	Kec. Panjalu	Masih menggunakan lahan parkir obyek wisata
10	Terminal Cibeureum	C	Kec. Sukamantri	Baik
11	Terminal Banjarsari	C	Kec. Banjarsari	-
12	Terminal Pamarican	C	Kec. Pamarican	Baik

e) Halte/Shelter

Fasilitas prasarana halte yang ada selain dari APBD Kabupaten Ciamis juga dibangun oleh pihak swasta. Meski pada tahun 2018 tidak dilaksanakan kegiatan pembangunan halte/shelter namun capaian indikator ini mencapai 100,00% sesuai pada grafik dibawah ini :

Gambar II.5
Perbandingan Jumlah Halte



Dari capaian tersebut di atas dibawah ini lokasi halte/shelter seperti pada tabel berikut :

Tabel II.12
Lokasi Halte/Shelter

No	Ruas Jalan	Volume (Lokasi)	Lokasi
1	Jl.Jend. Sudirman	6	SDN 1 Sindangrasa
			SMP N 6 Ciamis
			SMP N 3 Ciamis
			SD N Janggala
			SMK N 1 Ciamis
			SMP N 5 Ciamis
2	Jl.lwa K	1	Depan Organda
3	Jl. Pasar Shubuh	1	Pasar Shubuh
4	Jl. Ciptomangunkusumo	1	SD N 7 Ciamis
5	Jl.Tjokro	1	SD N 2 Ciamis
6	Jl. Ir. H. Juanda	2	Taman Lokasana
			Kancab BRI
7	Jl.Stasiun	1	Yogya Dept.Store
8	Jl.RE.Martadinata	1	Kampus UNIGAL
9	Jl. Yos Sudarso	1	Taman Yodas
10	Ruas Jalan Ciamis-Cirebon (Kawali)	1	Taman Surawisesa
11	Banjarsari	1	Masjid Agung
Jumlah		17	

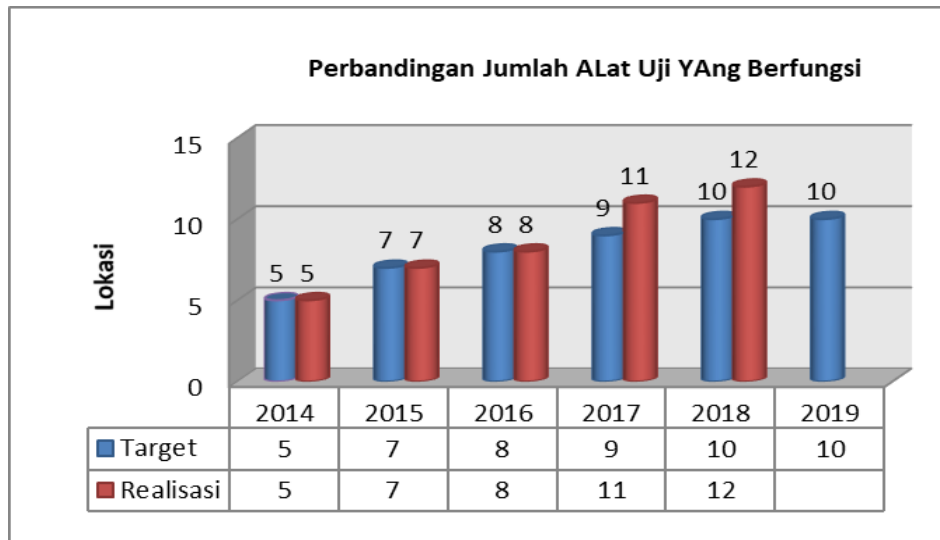
f) Alat uji kendaraan bermotor

Selama kurun waktu 5 tahun, dapat dilaporkan alat uji yang berfungsi tersebut yaitu :

- 1) Alat uji rem statis
- 2) Alat uji portable
- 3) Alat uji timbangan statis
- 4) Alat uji kincup roda depan
- 5) Alat uji lampu utama
- 6) Alat uji emisi gas buang (CoHC)
- 7) Alat uji ketebalan asap (smoke tester)
- 8) Alat uji kecepatan
- 9) Alat uji kebisingan
- 10) Alat uji tekanan ban
- 11) Alat uji pengukur dimensi
- 12) Play detector.

Dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar II.6
Perbandingan Jumlah Alat Uji Yang Berfungsi



g) Sarana Angkutan

Penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Ciamis dibagi menjadi 5 kelompok pelayanan, yaitu :

- Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) sebanyak 434 unit, meskipun Kabupaten Ciamis bukan sebagai titik simpul perjalanan trayek AKAP, namun banyak kendaraan angkutan penumpang umum trayek AKAP baik bus sedang maupun bus besar route trayeknya melewati Kabupaten Ciamis. Ini dikarenakan jalan nasional di Kabupaten Ciamis merupakan jalur utama di bagian selatan pulau Jawa.
- Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) ada sebanyak 520 unit, terdiri dari bus besar 17 unit bus sedang 57 unit dan bus kecil 446. Untuk trayek AKDP Kabupaten Ciamis sebagai simpul perjalanan kendaraan angkutan penumpang dari dan ke Ciamis.
- Angkutan Kota ada sebanyak 354 unit yang melayani wilayah Ciamis kota terdiri dari 13 jaringan trayek.
- Angkutan Perdesaan ada sebanyak 271 unit yang melayani wilayah perdesaan di Kabupaten Ciamis terdiri dari 19 jaringan trayek.

- Angkutan Perbatasan ada sebanyak 358 unit yang melayani Kabupaten Ciamis dengan beberapa daerah perbatasan terdiri dari 23 jaringan trayek.

h) Moda Kereta Api

Moda kereta api merupakan sarana transportasi massal yang dinilai memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan kendaraan moda jalan raya, keunggulan ini dilihat dari penggunaan ruang yang hemat, tingkat keselamatan tinggi, tidak macet, hemat energi, dan ramah lingkungan. Di Kabupaten Ciamis ada 2 (dua) stasiun yang memfasilitasi mobilisasi masyarakat menggunakan moda kereta api yaitu di stasiun Ciamis di Kecamatan Ciamis dan Stasiun Bojong di Kecamatan Cijeungjing. Meskipun jumlah pengguna moda kereta api relatif sedikit namun keberadaan moda kereta api di Kabupaten Ciamis cukup membantu masyarakat dalam melakukan perjalanan.

i) Indikator sesuai standar pelayanan minimal

Analisis dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.13
Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2018

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET PADA RENSTRA					REALISASI CAPAIAN SPM					RASIO CAPAIAN SPM				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
A	URUSAN PERHUBUNGAN																
1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75%	75%	75%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	133%	133%	133%	133%	133%
2	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	60%	60%	60%	60%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	167%	167%	167%	167%	167%
3	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	94%	100%	94%	100%	93%	94%	100%	94%
4	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40%	40%	40%	40%	40%	40%	58%	58%	58%	64%	64%	145%	145%	145%	160%	160%

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET PADA RENSTRA					REALISASI CAPAIAN SPM					RASIO CAPAIAN SPM				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
5	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) pada jalan Kabupaten/Kota.	60%	60%	60%	60%	60%	60%	41%	33%	32%	33%	32%	68%	55%	53%	55%	53%
6	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60%	60%	60%	60%	60%	60%	50%	50%	50%	50%	50%	83%	83%	83%	83%	83%
7	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	50%	50%	50%	50%	50%	50%	67%	67%	67%	67%	67%	134%	134%	134%	134%	134%
8	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	70%	50%	30%	30%	70%	70%	50%	30%	30%
9	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	40%	40%	40%	40%	40%	40%	33%	33%	33%	33%	33%	83%	83%	83%	83%	83%
10	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

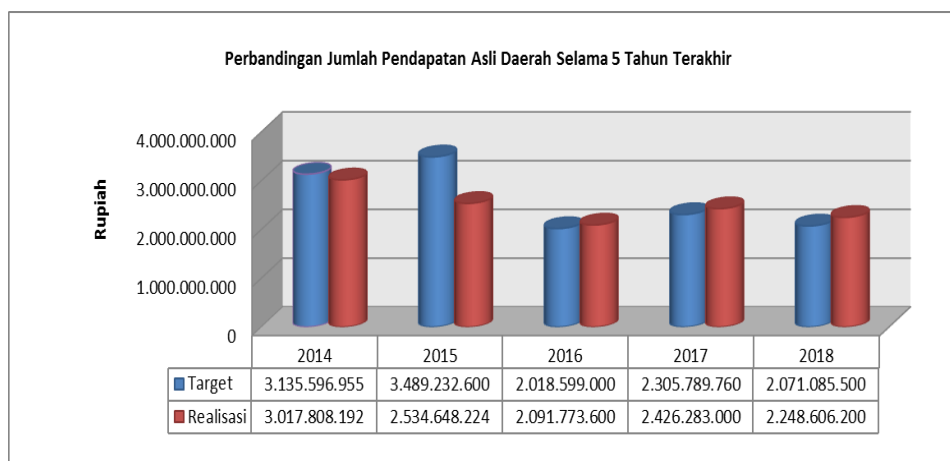
2. Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

a) Pendapatan Asli Daerah

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun dibawah ini dapat dilihat target dan realisasi pengelolaan pendapatan asli daerah di sektor perhubungan.

Gambar II.7

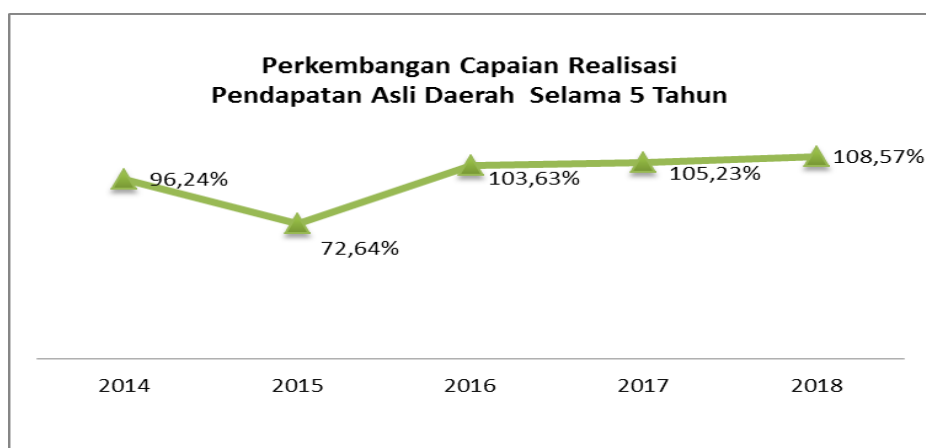
Jumlah Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah



Dari grafik tersebut diatas dibawah ini adalah perkembangan capaian realisasi pendapatan asli daerah selama 5 tahun :

Gambar II.8

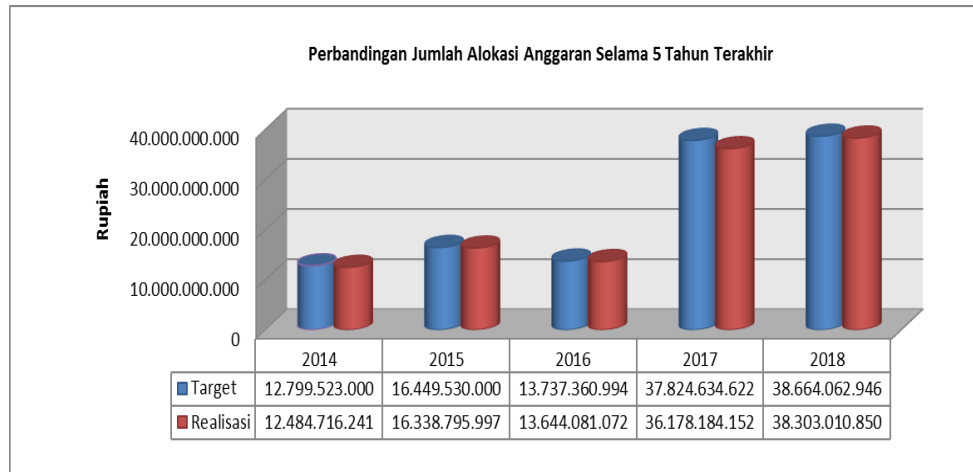
Data Perkembangan Capaian Realisasi PAD



b) Belanja Daerah

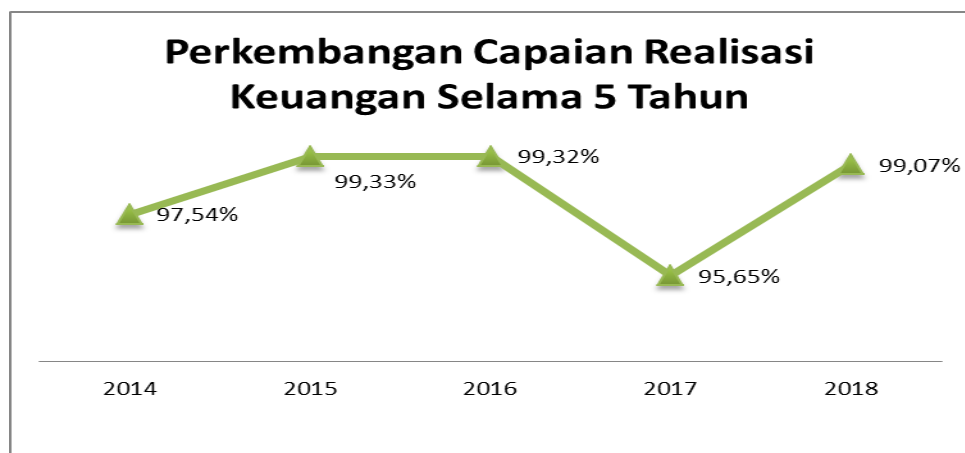
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun perkembangan alokasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Gambar II.9
Perbandingan Jumlah Alokasi Anggaran Selama 5 Tahun Terakhir



Dari grafik tersebut terlihat selisih yang sangat signifikan dimulai pada tahun 2017 hal ini dikarenakan pada tahun tersebut Dinas Perhubungan mendapat alokasi anggaran untuk pembayaran rekening listrik penerangan jalan umum sebesar kurang lebih Rp.17.000.000.000. Perkembangan capaian pengelolaan anggaran selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Gambar II.10
Perkembangan Capaian Realisasi Keuangan Selama 5 Tahun



Dari grafik tersebut di atas dapat dianalisis pada tahun 2017 yang paling rendah capaian realisasi keuangannya hal ini dikarenakan pada tahun tersebut penyerapan rekening listrik untuk pembayaran rekening penerangan jalan umum hanya bisa direalisasi sebesar sekitar 90,00%. Hal ini dikarenakan ada selisih perhitungan yang antara pihak PLN dan Dinas, sehingga pada setiap perencanaan yang akan datang meskipun pembayaran listrik *lumpsum* harus di dukung akurasi data yang rasional.Selama kurun waktu tahun 2009-2013 program dan kegiatan yang di kelola oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Ciamis rasio realisasi dan target penganggaran mengalami fluktuasi seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel II.14
Rasio Realisasi Anggaran dan Pendapatan Terhadap Target

NO	URAIAN	RASIO REALISASI DAN ANGGARAN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pendapatan	103,90%	137,66%	96,50%	118,75%	92,11%
2	Pendapatan Daerah	103,90%	137,66%	96,50%	118,75%	92,11%
3	Hasil Retribusi Daerah	103,90%	137,66%	96,50%	118,75%	92,11%
4	Belanja Dinas	97,55%	99,03%	99,32%	95,70%	99,07%
5	Belanja Tidak Langsung	96,70%	102,79%	99,72%	99,95%	99,07%
6	Belanja Pegawai	96,70%	102,79%	99,72%	99,95%	99,07%
7	Belanja Langsung	98,70%	95,96%	98,76%	94,79%	99,06%
8	Belanja Pegawai	98,17%	102,79%	99,85%	99,32%	99,28%
9	Belanja Barang dan Jasa	98,82%	99,93%	98,66%	92,79%	99,17%
10	Belanja Modal	98,67%	93,43%	98,34%	98,44%	98,82%

Tabel II.15
Jumlah Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi Keuangan Selama 5 Tahun Terakhir

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pendapatan	3.135.596.955	3.489.232.600	2.018.595.000	2.305.789.760	2.071.085.500	3.017.808.192	2.534.648.224	2.091.773.600	1.941.657.900	2.248.606.200
2	Pendapatan Daerah	3.135.596.955	3.489.232.600	2.018.595.000	2.305.789.760	2.071.085.500	3.017.808.192	2.534.648.224	2.091.773.600	1.941.657.900	2.248.606.200
3	Hasil Retribusi Daerah	3.135.596.955	3.489.232.600	2.018.595.000	2.305.789.760	2.071.085.500	3.017.808.192	2.534.648.224	2.091.773.600	1.941.657.900	2.248.606.200
4	Belanja Dinas	12.827.073.000	16.499.530.000	13.737.360.994	38.422.564.622	38.664.062.946	12.512.266.241	16.338.795.997	13.644.081.072	36.771.926.652	38.303.010.850
5	Belanja Tidak Langsung	7.382.315.000	7.397.401.000	8.022.451.644	6.803.509.622	8.838.509.946	7.138.457.154	7.603.949.527	5.643.935.674	6.800.212.552	8.756.592.202
6	Belanja Pegawai	7.382.315.000	7.397.401.000	8.022.451.644	6.803.509.622	8.838.509.946	7.138.457.154	7.603.949.527	5.643.935.674	6.800.212.552	8.756.592.202
7	Belanja Langsung	5.444.758.000	9.102.129.000	5.714.909.350	31.619.055.000	29.825.553.000	5.373.809.087	8.734.846.470	5.643.935.674	29.971.714.100	29.546.418.648
8	Belanja Pegawai	784.215.000	880.910.000	870.060.000	618.070.000	181.480.000	769.835.000	880.310.000	868.735.000	613.882.500	180.180.000
9	Belanja Barang dan Jasa	3.529.260.500	5.343.661.500	3.406.119.350	20.515.205.200	20.460.500.650	3.487.745.087	5.166.013.443	3.360.327.747	19.035.233.000	20.291.133.398
10	Belanja Modal	1.131.282.500	2.877.557.500	1.438.730.000	10.485.779.800	9.183.572.350	1.116.229.000	2.688.523.027	1.414.872.927	10.322.598.600	9.075.105.250

D. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan yang dimiliki Dinas Perhubungan yang merupakan potensi yaitu :

- a) Kapasitas personil dinas yang memadai yaitu sebanyak 216 aparatur sipil negara yang terdiri dari pegawai yang bestatus sebagai PNS maupun tenaga non-PNS.
- b) Ketersediaan prasarana kerja seperti gedung kantor, gedung unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan terminal.
- c) Dukungan regulasi dalam menyelenggarakan urusan perhubungan didukung oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perhubungan.
- d) Dukungan koordinasi terhadap instansi terkait yang kondusif sesuai Keputusan Bupati Ciamis Nomor 555/Kpts.Kpts-Huk 2012 Tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Kelemahan

- a) Dari jumlah aparatur sipil negara yang ada di Dinas Perhubungan, jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi teknis bidang perhubungan masih minim terutama untuk tenaga teknis penguji kendaraan bermotor dan perencanaan transportasi darat.
- b) Prasarana dan sarana kerja yang belum memadai baik di gedung kantor utama maupun di unit pelaksana teknis dinas.

3. Tantangan

- a) Menurunkan angka dan fatalitas kecelakaan lalu lintas.
- b) Kemajuan teknologi merupakan tantangan dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang perhubungan diantaranya :
 - Penggunaan *smart card* atau BLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik) pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor;

- Penerapan angkutan konvensional (angkot) yang dilengkapi dengan sistem aplikasi dalam pelayanannya terhadap pengguna angkutan umum.
 - Penerapan alat pemberi isyarat lalu lintas berbasis *area traffic control system* (ATCS).
- c) Pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang cukup pesat setiap tahunnya.
- d) Fenomena beroperasinya angkutan umum dalam jaringan (angkutan *online*) dimana pelayanan angkutan konvensional belum optimal.

4. Peluang

- a) Dukungan pemerintah dan pemerintah provinsi Jawa Barat dalam kampanye keselamatan lalu lintas baik melalui sosialisasi ke kabupaten/kota, pelaksanaan diklat dan bimtek serta pemberian media/alat peraga sosialisasi berupa leaflet, banner, helm keselamatan.
- b) Pemerintah Kabupaten Ciamis berkomitmen untuk menekan angka dan fatalitas kecelakaan lalu lintas.
- c) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara terintegrasi dan komputerisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan memberikan bantuan berupa komputer dan software pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- d) Adanya kesempatan untuk mengusulkan kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan melalui dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Perhubungan dan bantuan keuangan provinsi Jawa Barat.
- e) Posisi strategis Kabupaten Ciamis setelah dibangunnya bandar udara internasional Kertajati di Majalengka.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Kabupaten Ciamis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat yang wilayahnya telah berkurang dengan adanya pemekaran menjadi Kota Banjar berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar Di Provinsi Jawa Barat, dan pada tahun 2012 dibentuk Kabupaten Pangandaran hasil pemekaran Kabupaten Ciamis berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat.

Sebagai konsekuensi dari adanya pemekaran wilayah maka luas Kabupaten Ciamis adalah 1.433,10 Km² terdiri dari 27 Kecamatan, 258 Desa dan 7 Kelurahan. Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Barat, letaknya berada diujung timur provinsi Jawa Barat, yang jaraknya dari ibukota provinsi sekitar 121 Km. berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Ciamis berada pada posisi strategis karena dilalui jalan nasional lintas Jawa Barat – Jawa Tengah yaitu jalur Bandung – Tasikmalaya – Ciamis – Cilacap dan merupakan jalur alternatif lintas Cirebon – Ciamis.

Secara administratif, Kabupaten Ciamis berbatasan dengan daerah kabupaten/kota sebagai berikut :

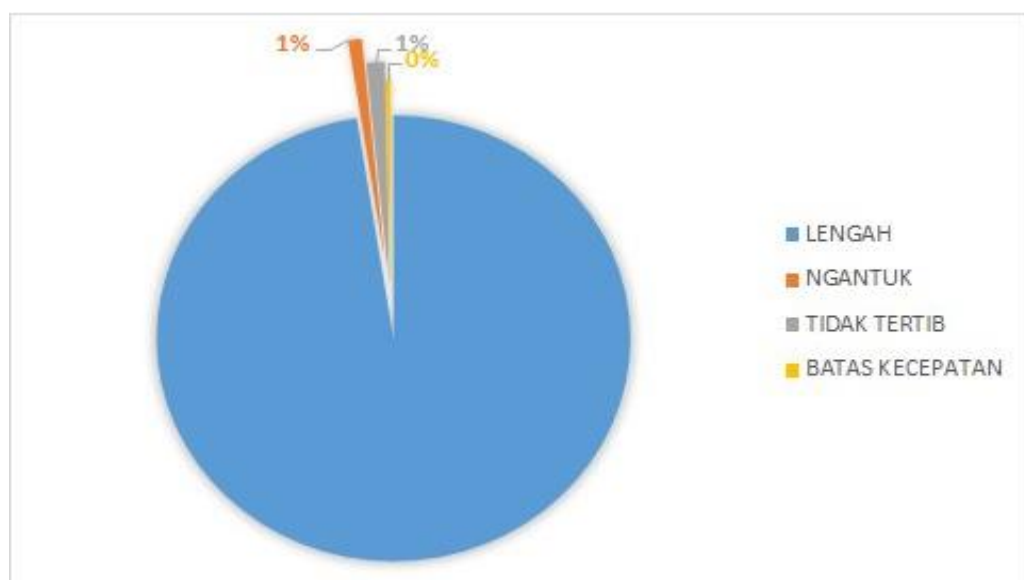
Sebelah Utara : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan
Sebelah Barat : Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya
Sebelah Timur : Provinsi Jawa Tengah dan Kota Banjar
Sebelah Selatan : Kabupaten Pangandaran.

Bidang perhubungan terutama jasa transportasi semakin vital peranannya seiring dengan kemajuan perekonomian masyarakat dewasa ini, karena kebutuhan akan jasa transportasi merupakan kebutuhan turunan yang berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat. Dinas Perhubungan akan mengakomodir dengan baik kebutuhan masyarakat akan tersedianya sarana, prasarana dan pelayanan bidang perhubungan, karena prasarana transportasi yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas pergerakan orang dan barang yang dilakukan oleh masyarakat dalam menunjang aktifitas kegiatan sehari-hari.

Permasalahan bidang perhubungan secara umum yaitu :

1. Belum maksimalnya peningkatan keselamatan jalan, ada 4 faktor penyebab kecelakaan yaitu faktor jalan, kendaraan, lingkungan dan manusia (*human error*), menurut data kepolisian resort Ciamis melalui kajian Tim Praktek Kerja Profesi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal bahwa prosentasi penyebab kecelakaan pada tahun kajian (2016 dan 2017) adalah sebesar 100,00% bahkan lebih. Diilustrasikan pada gambar bahwa penyebab dari faktor manusia dominan adalah karena lengah.

Gambar III.1
Prosentasi Penyebab Kecelakaan Dari Faktor Manusia



Sumber : Data Analisa Tim PKP PKTJ Tegal, Tahun 2018

2. Belum optimalnya penataan fasilitas parkir pada tepi jalan umum dan pusat kegiatan atau fasilitas umum lainnya, hal ini dapat dilihat di beberapa lokasi seperti stadion dan gedung kesenian daerah.
3. Belum optimalnya pelayanan angkutan penumpang umum di terminal.
4. Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan umum, ini teridentifikasi dari *load factor* angkutan umum rata-rata dibawah 70,00%, waktu tunggu di terminal yang lama dan kondisi kendaraan angkutan yang tidak bersih membuat penumpang tidak nyaman, namun tidak hanya itu penyebab lainnya yaitu kepemilikan kendaraan bermotor yang semakin pesat, sehingga banyak masyarakat yang pindah untuk menggunakan kendaraan pribadi selain itu juga dengan beroperasinya angkutan umum dalam jaringan (angkutan *online*).
5. Belum maksimalnya operasional jaringan trayek sehingga perlu dilakukan evaluasi.
6. Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor menggunakan sistem komputerisasi dan SMART CARD.
7. Belum maksimalnya ketersediaan perlengkapan jalan, perlengkapan jalan dimaksud berupa rambu, marka, penerangan jalan umum dan lainnya. Pengadaan dan pemasangannya harus terus berkelanjutan mengingat rambu yang sudah terpasang kondisinya sudah rusak bahkan untuk kasus penerangan jalan umum ada beberapa spare part yang hilang sehingga PJU tersebut tidak maksimal.

B. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi

Visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang dituangkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 yaitu **“Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua.”** Pernyataan visi Kabupaten Ciamis 2019-2024 memiliki makna sebagai berikut :

Mantapnya Kemandirian Ekonomi, bahwa dalam 5 tahun ke depan, perekonomian Kabupaten Ciamis dalam kondisi yang mantap dalam arti kokoh dan kuat terutama dalam menghadapi tantangan

perekonomian nasional dan global. Perekonomian Kabupaten Ciamis diupayakan harus mencapai pertumbuhan yang tinggi, dimana secara simultan akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pendapatan *per kapita*, peningkatan daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi secara signifikan. Oleh karenanya perekonomian dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi rakyat dengan memanfaatkan potensi unggulan lokal dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah dan mengurangi ketergantungan kepada daerah lain.

Sejahtera Untuk Semua, bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus dinikmati oleh semua secara adil dan merata.

Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan visi yang sinergis dengan visi RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, yaitu Dengan **Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera**.

2. Misi

Sedangkan yang menjadi misi Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yaitu:

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bahwa untuk tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mempunyai kemampuan untuk mengolah sumber daya ekonomi yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan.

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah.

Bahwa untuk mendukung aktivitas perekonomian,

diperlukan ketersediaan infrastruktur yang akan menunjang perkembangan ekonomi wilayah.

Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal.

Bahwa perekonomian daerah dibangun dengan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi rakyat sesuai dengan potensi-potensi unggulan lokal guna memperkuat struktur perekonomian daerah.

Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Bahwa sumber daya alam dan Lingkungan Hidup sebagai modal pembangunan ekonomi harus digunakan secara bijaksana dengan memperhatikan aspek-aspek kelestariannya sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan.

Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Bahwa untuk mendukung tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan tata kelola Pemerintahan yang semakin efektif dan efisien untuk tercapainya pelayanan publik yang berkualitas.

Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa.

Bahwa otonomi desa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diperkuat dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan desa untuk mencapai kemandirian, baik kemandirian sosial maupun ekonomi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, yaitu tahap yang diarahkan untuk memantapkan hasil pembangunan

pada tahap sebelumnya dalam rangka pencapaian daya saing untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia dan pengelolaan potensi wilayah yang berkualitas dengan pemantapan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Dinas perhubungan sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan. Dkaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ciamis dalam RPJMD Tahun 2019-2024 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan maka yang menjadi fungsi dan tugas Dinas Perhubungan terkait dengan pencapaian Misi 2 yaitu **“Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah”**.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pertumbuhan ekonomi dapat mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan dengan mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yang dapat membantu pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Tabel III.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi	<i>Mantapnya kemandirian ekonomi, sejahtera untuk semua</i>		
Misi	<i>Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah</i>		
Misi	Permasalahan Pelayanan DISHUB	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<i>Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah</i>	<i>Belum maksimalnya peningkatan keselamatan jalan</i>	<i>Pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang</i>	<i>Masyarakat masih tetap membutuhkan sosialisasi</i>
	<i>Belum optimalnya penataan fasilitas parkir pada tepi jalan umum dan pusat kegiatan atau fasilitas umum lainnya</i>	<i>Lahan parkir yang tidak memadai</i>	<i>Pemerintah daerah berkomitmen untuk menata operasional parkir</i>
	<i>Belum optimalnya pelayanan angkutan penumpang umum di terminal</i>	<i>Pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor semakin pesat</i>	<i>Masih ada sebagian masyarakat yang membutuhkan layanan angkutan umum</i>
	<i>Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan umum</i>	<i>Kepengusahaan angkutan umum yang labil</i>	<i>Perlindungan angkutan penumpang umum</i>
	<i>Belum maksimalnya operasional jaringan trayek sehingga perlu dilakukan evaluasi</i>	<i>Jaringan trayek yang ada belum sepenuhnya terisi</i>	<i>Pemerintah Daerah</i>
	<i>Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor</i>	<i>Pelayanan pengujian belum dilengkapi dengan teknologi informasi</i>	<i>Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan teknis berupa computer dan sistem aplikasi pengujian yang terintegrasi dengan UPTD PKB se Jawa Barat</i>
	<i>Belum maksimalnya ketersediaan perlengkapan jalan.</i>	<i>Banyak perlengkapan jalan yang sudah terpasang</i>	<i>Adanya alokasi dana untuk pengadaan perlengkapan jalan dan</i>

<i>Visi</i>	<i>Mantapnya kemandirian ekonomi, sejahtera untuk semua</i>		
<i>Misi</i>	<i>Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah</i>		
<i>Misi</i>	<i>Permasalahan Pelayanan DISHUB</i>	<i>Faktor</i>	
		<i>Penghambat</i>	<i>Pendorong</i>
		<i>banyak yang rusak dan hilang</i>	<i>bantuan keuangan provinsi Jawa Barat dan dana DAK.</i>

C. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

1. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan

Kebijakan umum Kementerian Perhubungan dalam pembangunan dna penyelenggaraan transportasi (2015-2019) meliputi strategis sebagai berikut :

- a) Menurunnya angka kecelakaan transportasi
 - 1) Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi
 - 2) Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha
 - 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi
 - 4) Penguatan kelembagaan
- b) Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi
 - 1) Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi
 - 2) Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi
- c) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi
 - 1) Peningkatan kehandalan sarana dna prasarana transportasi serta penataan jaringan/rute
 - 2) Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dna prasarana transportasi
 - 3) Implementasi standara pelayanan public pada sarana dan prasarana transportasi

- d) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
 - 1) Menyusun Man Power planning SDM transportasi
 - 2) Menyusun Training Needs Analysis (TNA) SDM transportasi
 - 3) Mengembangkan kapasitas diklat SDM transportasi, dengan cara :
 - Menata regulasi penyelenggaraan diklat SDM transportasi
 - Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan
 - Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi.
- e) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai kebutuhan
 - 1) Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti
 - 2) Peningkatan sinergitas antara Badan Litbang Perhubungan dengan pengguna jasa penelitian
 - 3) Peningkatan kerjasama penelitian antar lembaga riset dan industri
 - 4) Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan untuk penguatan peran Badan Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan.
- f) Meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan *e governance*
 - 1) Penuntasan agenda reformasi birokrasi
 - 2) Integrasi system manajemen dan pelaporan kinerja dan keuangan
 - 3) Penyederhanaan perizinan dan penerapan *e-government* di lingkungan Kementerian Perhubungan
- g) Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan
 - 1) Pemetaan arah/kebutuhan kerangka regulasi
 - 2) Peningkatan koordinasi dengan instansi lainnya
 - 3) Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan
 - 4) Percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih
- h) Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan Meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim
- 2) Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energy baru terbarukan
- 3) Penerapan system manajemen transportasi dalam rangka peningkatan penggunaan angkutan umum
- i) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan *Clean Governance*
 - 1) Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai quality assurance
 - 2) Peningkatan kualitas hasil pengawasan serta SDM pengawasan
- j) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan system transportasi antarmoda/multimoda
 - 1) Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi
 - 2) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berdasarkan outcomes
 - 3) Pembangunan jaringan pelayanan yang terintegrasi antarmoda
 - 4) Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi melalui kerjasama Pemerintah dan badan usaha serta melalui pembiayaan swasta
 - 5) Penyiapan konsep dan implementasi angkutan laut dari barat ke timur Indonesia
- k) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur
 - 1) Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi guna memperkecil kesenjangan antar wilayah timur dan barat
 - 2) Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi
 - 3) Penyediaan sarana angkutankeperintisan di wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan rawan bencana.

Tabel III.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenhub	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dna prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal	Belum tercapainya target nasional Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Anggaran untuk pembangunan fasilitas LLAJ yang terbatas	Komitmen Pemda; Kerjasama dengan Dishub Provinsi Jawa Barat
		Angka dan fatalitas kecelakaan lalu lintas meningkat	Tingkat kesadaran pengguna jalan masih rendah	Koordinasi antar stakeholder transportasi dalam Forum LLAJ
2	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antarwilayah	Kerusakan jalan di sebagian wilayah akibat kelebihan muatan oleh kendaraan barang	Keterbatasan sarana dna prasarana	Komitmen Pemerintah Daerah dan kerjasama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Keputusan Menteri Perhubungan R.I Nomor KP. 881 Tahun 2018 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 disebutkan bahwa sebagai Perwujudan Visi Presiden (Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong) dalam sektor transportasi yaitu dengan **“Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”**. Hal tersebut merupakan cita-cita Kementerian Perhubungan dimana konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Konektivitas Nasional adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara;

Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air;

Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;

Nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security dan sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*) serta dapat berperan dalam pengembangan wilayah.

Misi Kementerian Perhubungan R.I.

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan R.I Nomor KP. 881 Tahun 2018 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 disebutkan misi Kementerian Perhubungan adalah :

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
4. Meningkatkan Kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;

5. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan Infrastruktur sektor transportasi;
6. Restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten;
7. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Penjabaran masing-masing Misi Kementerian Perhubungan tersebut dengan memperhatikan lingkungan strategis adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi. Dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi dibidang keselamatan/keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.
- b) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah. Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah
- c) Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi. Dalam kondisi keuangan negara yang terimbas ketidakpastian situasi keuangan dunia tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan jasa transportasi karena masih terdapat beberapa operator yang memiliki keterbatasan kemampuan melakukan perawatan dan peremajaan armada, demikian pula pemerintah

secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan Infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat, sejalan dengan pemulihan pasca krisis keuangan global, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana transportasi.

- d) Meningkatkan Kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi Misi meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi terus diarahkan untuk pemenuhan akan peningkatan permintaan pelayanan transportasi, sehingga ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan transportasi tetap mencukupi.
- e) Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan Infrastruktur sektor transportasi. Ditengah keterbatasan anggaran belanja pemerintah didalam penyediaan infrastruktur perlunya mendorong peningkatan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sehingga kedepan anggaran belanja pemerintah diarahkan untuk membangun infrastruktur yang bersifat pelayanan *public* dan dinilai tidak layak secara finansial.
- f) Melanjutkan proses restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan dan kelembagaan sebagai upaya peningkatan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi. Sesuai dengan prinsip *good governance* melalui penerbitan Undang-Undang di sektor transportasi telah dilaksanakan restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan transportasi antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi

(*regulatory reform*) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi.

- g) Melanjutkan proses restrukturisasi dan reformasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten Pelaksanaan restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jatidirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi.
- h) Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim sebagai upaya untuk pengembangan jasa transportasi kedepan, Kementerian Perhubungan secara terus menerus meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang transportasi serta peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititikberatkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (*global warming*) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan.

2. Telaahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
- Yang menjadi isu strategis bidang perhubungan di Jawa Barat adalah salah satunya yaitu rencana pengembangan jaringan prasarana di WP Priangan Timur-Pangandaran, terdiri atas:
- a) Pembangunan Jalur KA Tasikmalaya-Cijulang; Cijulang-Cipatujah-Pameungpeuk; Pameungpeuk-Cikajang; Rancabuaya – Sukabumi dan Ciwidey-Rancabuaya;
 - b) Reaktivasi dan peningkatan (revitalisasi) Jalur KA Banjar-Pangandaran-Cijulang; Cibatug- Garut-Cikajang;
 - c) Pembangunan/ Pengembangan Stasiun/ Bangunan Operasional pada jalur Kereta Api;
 - d) Pembangunan, rehabilitasi/ peningkatan dan revitalisasi sistem persinyalan, telekomunikasi, dan kelistrikan pada jalur Kereta Api;
 - e) Pembangunan terminal Tipe A di Kab. Ciamis, dan Kota Banjar;
 - f) Pembangunan/ Rehabilitasi terminal tipe A di Kota Tasikmalaya dan Kab. Garut;
 - g) Pembangunan/ Rehabilitasi Terminal Tipe B di Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran dan Kota Tasikmalaya;
 - h) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan di Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Pangandaran;
 - i) Pembangunan Pelabuhan/ Terminal Khusus penunjang aktivitas perekonomian;
 - j) Pengembangan Pelabuhan Bojongsalawe dan Pelabuhan Majingklak di Kab. Pangandaran;
 - k) Pembangunan pelabuhan sungai danau di Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran, dan di Kota Banjar;
 - l) Pengembangan Pangkalan Udara di Cikelet/ Pameungpeuk Kab. Garut;
 - m) Optimalisasi fungsi Bandar Udara Nusawiru di Kab. Pangandaran;
 - n) Rencana Pengembangan Bandar Udara Wiriadinata (Kab. Tasikmalaya);
 - o) Peningkatan akses wilayah Priangan Timur menuju BIJB Kertajati; dan;

- p) Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang perhubungan khususnya infrastruktur strategis yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah mengamanatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas.

Penetapan asas tersebut tentunya dilaksanakan demi mencapai dan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Untuk itu, dalam rangka menyelaraskan dan menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis yang mengakomodasikan kepentingan nasional, regional dan lokal dalam satu kesatuan penataan ruang. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai kawasan agrobisnis dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan mitigasi kebencanaan.

Sejalan dengan tujuan tersebut yang menjadi kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Ciamis meliputi :

- a) peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
- b) penataan lahan pertanian lahan basah;
- c) pengembangan wisata potensial ramah lingkungan dan ramah budaya;
- d) penataan lahan dan kawasan hutan;
- e) penataan kawasan perkebunan;
- f) pengembangan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan sesuai potensi lestari;
- g) pengembangan sektor industri, peternakan, dan perdagangan mendukung agrobisnis;
- h) pengembangan pusat kegiatan agrobisnis, pariwisata dan permukiman;
- i) pengembangan sistem jaringan prasarana kegiatan agrobisnis, pariwisata, dan permukiman;
- j) pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebencanaan;
- k) peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
- l) Pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencana.

Terhadap tujuan tersebut dalam rangka mewujudkan Kabupaten Ciamis sebagai kawasan agrobisnis dan pariwisata akan didukung melalui beberapa program dan kegiatan yang ada pada Dinas perhubungan seperti kelengkapan perlengkapan jalan dan fasilitas perhubungan disepanjang ruas jalan akses pengembangan kawasan tersebut.

Terhadap rencana pengembangan kawasan agrobisnis dan pariwisata tersebut diidentifikasi bahwa untuk urusan perhubungan rencana struktur ruang ada pada Rencana Jaringan Transportasi Darat dan Jaringan Transportasi Perkeretaapian.

Berikut disajikan hasil telaahan struktur ruang wilayah terhadap rencana jaringan transportasi.

Tabel III.3
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW						
		Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Rencana jaringan transportasi							
	a. Jaringan Transportasi Darat	Pembangunan Terminal Tipe.C	Sidarahayu,	√				
			Banjarsari		√			
			Cimaragas			√		
	b. Jaringan Transportasi Perkeretaapian	Peningkatan akses terhadap layanan kereta api	Ciamis	√	√	√	√	√

2. Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Tujuannya untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dan mengintegrasikannya dalam pembangunan.

Kaitannya dengan penyusunan Rencana Strategis memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan dalam kerangka prinsip keberlanjutan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat “lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut :

- a) Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul
- b) Mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, termasuk opsi praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik
- c) Antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan
- d) Peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul
- e) Aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang memiliki 4 pilar yaitu (1) peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, (2) keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, (3) kualitas lingkungan hidup, dan (4) pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang baik.

Dokumen KLHS RPJMD ini bersifat *ex-ante*, artinya memberikan masukan sebelum dokumen RPJMD disahkan, sehingga diharapkan konsep, arah, prinsip, dan usulan program yang disampaikan dalam

dokumen ini dapat diintegrasikan kedalam dokumen RPJMD yang sedang dibuat. Dokumen ini menggunakan 17 Tujuan pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai dasar analisis dan tolak ukur tercapainya agenda pembangunan di Kabupaten Ciamis. Hal ini merupakan langkah strategis, sebagai bukti bahwa Kabupaten Ciamis berkomitmen melaksanakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Komitmen ini sejalan dengan Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Nawacita yang telah diterjemahkan dalam RPJMN 2015-2019.

Sesuai dengan pelayanan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan terhadap kajian lingkungan hidup strategis terdapat 2 (dua) indikator yaitu :

- a) Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia dan penyandang disabilitas;
- b) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.

Dari kedua indikator tersebut untuk dokumen KLHS tahun 2019-2024 belum dapat diukur karena data dukung tidak ada dan perlu dilakukan survey untuk melengkapi dokumen KLHS apabila diperlukan revisi.

E. Penentuan Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Masih banyaknya ruas-ruas jalan Kabupaten yang belum dilengkapi rambu-rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas
2. Masih banyaknya penerangan jalan umum (PJU) yang belum dilengkapi dengan alat ukur pemakaian (APP)
3. Kurangnya fasilitas angkutan orang di Kabupaten Ciamis

4. Kebutuhan aplikasi lokal untuk mengakomodir angkutan konvensional dalam persaingan usaha dengan angkutan dalam jaringan (online) yang merupakan perkembangan kemajuan ilmu teknologi
5. Isu keselamatan jalan dan kampanye keselamatan yang masih kurang gencar.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN

Tujuan dari dibentuknya lembaga Dinas Perhubungan untuk mencapai suatu kondisi yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis di bidang perhubungan yang dihadapi oleh kabupaten Ciamis.

Adapun yang menjadi tujuan yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yang efektif dan efisien dalam mewujudkan pelayanan prima
2. Mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

B. SASARAN

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.

Adapun yang menjadi sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah
3. Meningkatnya sarana prasarana keselamatan lalu lintas yang terpasang dan berfungsi dengan baik
4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum
5. Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana LLAJ

Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah :

Tabel IV.1

Tujuan Dan Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yang efektif dan efisien dalam mewujudkan pelayanan prima	Indeks reformasi birokrasi Dinas Perhubungan	Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah	Kualitas pelaporan keuangan
				Level Maturitas SPIP
				Nilai LHE AKIP
2.	Mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Meningkatnya sarana prasarana keselamatan lalu lintas yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase pemasangan perlengkapan jalan
				Prosentase pemasangan penerangan jalan umum
				Prosentase masyarakat yang ikut berpartisipasi pada promosi keselamatan LLAJ
			Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Prosentase layanan angkutan darat
			Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana LLAJ	Prosentase alat uji yang berfungsi dengan baik

Tabel IV.2

Tabel Tujuan dan Sasaran Beserta Target Indikator Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	REALISASI 2018	TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yang efektif dan efisien dalam mewujudkan pelayanan prima		Indeks reformasi birokrasi Dinas Perhubungan	Point	85,25	85,30	85,35	85,40	85,45	85,50
		Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Point	85,25	85,30	85,35	85,40	85,45	85,50
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah	Kualitas pelaporan keuangan	Point	672	700	725	750	775	800
			Level Maturitas SPIP	Point	3	3	3	3	3	3
			Nilai LHE AKIP	Point	71,72	71,73	71,74	71,75	71,76	71,77
2.	Mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan		Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	%	5	5	5	5	5	5
		Meningkatnya sarana prasarana keselamatan lalu lintas yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase pemasangan perlengkapan jalan	%	141,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Prosentase pemasangan penerangan jalan umum	%	108,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Prosentase masyarakat yang ikut berpartisipasi pada promosi keselamatan LLAJ	%	88,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Prosentase layanan angkutan darat	%	11,48	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
			Prosentase jumlah terminal yang berfungsi dengan baik	%	91,67	91,67	100,00	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana LLAJ	Prosentase alat uji yang berfungsi dengan baik	%	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah yang memuat program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka berpikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dalam lima tahun kedepan yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perhubungan mencapai tujuan dan sasaran strategis dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

A. STRATEGI

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut maka yang menjadi strategi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan perhubungan
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Perhubungan
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlengkapan jalan sesuai standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
4. Meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana perhubungan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor
7. Meningkatkan pembinaan, sosialisasi dan kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

B. ARAH KEBIJAKAN

Sedangkan kebijakan dari strategi tersebut di atas yaitu :

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Meningkatkan Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Meningkatkan Perencanaan Dan Penganggaran Kerja Perangkat Daerah
7. Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan
8. Meningkatkan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
9. Meningkatkan Peningkatan Pelayanan Angkutan
10. Meningkatkan Pengamanan Lalu Lintas
11. Meningkatkan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
12. Meningkatkan Promosi Keselamatan LLAJ
13. Meningkatkan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan terhadap visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 dapat dipetakan sebagai berikut :

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan terhadap Visi Misi RPJMD

Visi	Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua		
Misi	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yang efektif dan efisien dalam mewujudkan pelayanan prima	Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan pelayanan perhubungan	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
			Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
			Meningkatkan disiplin aparatur
			Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Perhubungan	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
			Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran kerja perangkat daerah
Mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatnya sarana prasarana keselamatan lalu lintas yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlengkapan jalan sesuai standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatkan pengamanan lalu lintas
			Meningkatkan pengelolaan penerangan jalan umum
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas	Meningkatkan pembinaan, sosialisasi dan kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatkan promosi keselamatan LLAJ

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum	Meningkatkan pelayanan angkutan
			Meningkatkan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
	Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana LLAJ	Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
			Meningkatkan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah memiliki program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pencapaian tujuan dimaksud Dinas Perhubungan melaksanakan program kegiatan non urusan dan urusan wajib perhubungan. Adapun rincian program dan kegiatan non urusan dan urusan wajib adalah sebagai berikut :

A. Program Dan Kegiatan Non Urusan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - c. Penyediaan alat tulis kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - g. Penyediaan makanan dan minuman
 - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - i. Rapat-rapat koordinasi di dalam daerah
 - j. Penyediaan jasa pengamanan kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - e. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - f. Pengadaan Peralatan Kantor
 - g. Pengadaan Perlengkapan Kantor

- h. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- i. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
- j. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- k. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor
- l. Penyewaan Tanah/Bangunan Untuk Gedung Kantor
- m. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan (Penataan Lingkungan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis)
- n. Pengadaan Tanah Terminal Manganti
- o. Pengadaan Tanah Terminal Banjarsari
- p. Pengadaan Tanah Terminal Cimaragas
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - b. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
 - c. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
 - b. Bimbingan Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perhubungan
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
 - c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Dan Barang Realisasi Anggaran
 - d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - e. Penyusunan Pelaporan Aset Barang Milik Daerah Lingkup Perangkat Daerah
 - f. Pengelolaan Data Dan Informasi Perangkat Daerah
- 6. Program Perencanaan Dan Penganggaran Kerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Rencana Strategis
 - b. Penyusunan Perencanaan Program Dan Kegiatan SKPD
 - c. Rencana Kerja Anggaran

B. Program Dan Kegiatan Urusan Wajib Perhubungan

1. Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan

- a Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
- b Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar Dan Prosedur Di Bidang Perhubungan
- c Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
- d Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- e Pembangunan Terminal Manganti
- f Pembangunan Terminal Banjarsari
- g Pembangunan Taman Edukasi Lalu Lintas
- h Peningkatan Fasilitas Taman Edukasi Lalu Lintas
- i Pembangunan Halte/Shelter
- j Pengadaan Fasilitas Penyeberangan
- k Pengadan Sistem Informasi Pelayanan Perhubungan

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

- a Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
- b Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

- a Kegiatan pengendalian disiplin pengoprasian angkutan umum di jalan raya
- b Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan
- c Evaluasi Jaringan Trayek
- d Pengawasan operasional Terminal di UPTD Terminal Ciamis
- e Pengawasan operasional Terminal di UPTD Terminal Kawali
- f Pengawasan operasional terminal di UPTD Terminal Banjarsari
- g Pemantauan Dan Pembinaan Perizinan Angkutan Penumpang Umum
- h Subsidi Angkutan Pelajar

- i Pengembangan Pelayanan Angkutan Umum Dalam Jaringan
(GALEND *Galuh Online On The Go*)
4. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
 - a Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
 - b Pengadaan Marka Jalan
 - c Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
 - d Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
 - e Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Berbasis ATCS
 - f Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
 - g Pelaksanaan Wahana Tata Nugraha
 - h Penataan Kawasan Tertib Lalu Lintas
 - i Peningkatan Fasilitas Perparkiran
 - j Pembinaan Dan Pengawasan Juru Parkir
 - k Pengamanan Lalu Lintas Dan Angkutan Lebaran, Natal Dan Tahun Baru
 - l Pengadaan Kendaraan Operasional Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas
 - m Rute Aman Selamat Sekolah
 - n Operasionalisasi Sistem Informasi Pelayanan Perhubungan (Smart Building)
 5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
 - a Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
 - b Pengawasan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor
 - c Pembangunan Gedung Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan
 - d Pengadaan Kendaraan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Keliling
 - e Evaluasi Dan Pembinaan Perusahaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
 6. Program Peningkatan Promosi Keselamatan LLAJ
 - a Penataan Ruas Jalan Rawan Kecelakaan Lalu Lintas
 - b Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan
 - c Pembinaan Teknis Penyuluh Keselamatan LLAJ

- d. Sosialisasi Keselamatan LLAJ
 - e. Bulan Keselamatan
7. Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
- a. Pengadaan Penerangan Jalan Umum
 - b. Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum
 - c. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
 - d. Pengadaan Kendaraan Unit PJU
 - e. Rencana Induk Penerangan Jalan Umum

Program Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis tersebut diatas merupakan program prioritas RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. Selanjutnya pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas dimaksud didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan sebagai penjabaran dari rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu pendanaan sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Adapun kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Dinas Perhubungan yang diimplementasikan dengan pelaksanaan kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Selanjutnya daftar rincian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 secara rinci tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel VI.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2019-2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (*X1000)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
									2020		2021		2022		2023		2024						
									Target	Rp *)	Target	Rp *)	Target	Rp *)	Target	Rp *)	Target	Rp *)	Target	Rp *)			
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yang efektif dan efisien dalam mewujudkan pelayanan prima	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatkannya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	01					85,30		85,35		85,40		85,45		85,50		85,50				
					Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	18.720.600	12	18.950.000	12	18.965.000	12	18.965.000	12	18.965.000	12	94.565.600	Non Urusan		Kantor Dishub
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu pembayaran rekening jasa komunikasi, listrik dan air	Bulan	12	12	18.153.600.000	12	18.120.000.000	12	18.130.000.000	12	18.130.000.000	12	18.130.000.000	12	90.663.600.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	waktu pembayaran tenaga kebersihan kantor dan retribusi persampahan	Bulan	12	12	114.600.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	594.600.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	Bulan	12	12	75.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	475.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	12	75.400.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	475.400.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
					Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya alat listrik dan elektronik	Bulan	12	12	35.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	235.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
					Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Jumlah belanja surat kabar/majalah dan buku perundang-undangan yang disediakan	Bulan	12	12	12.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	72.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub

				017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya jamuan makan dan minum harian, tamu dan rapat	Bulan	12	12	75.000.000	12	85.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	430.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
				018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan dinas ke luar daerah	Bulan	12	12	150.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	1.350.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
				019	Rapat-rapat koordinasi di dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas di dalam daerah	Bulan	12	12	30.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	230.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
				020	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah personil petugas pengamanan	Bulan	12	12	-	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	40.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
				02	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur	%	100	100	1.540.000.000	100	2.450.000.000	100	1.540.000.000	100	545.000.000	100	545.000.000	100	6.620.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
				005	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	1	200.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
				007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	jenis	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5	100.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
				009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	jenis	8	4	50.000.000	5	50.000.000	5	80.000.000	6	80.000.000	6	80.000.000	26	340.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
				011	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	Jenis	4	4	50.000.000	5	50.000.000	6	75.000.000	7	80.000.000	7	80.000.000	29	335.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
				012	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit perlengkapan kantor yang disediakan	Buah	375	300	50.000.000	350	50.000.000	350	50.000.000	400	50.000.000	400	50.000.000	1.800	250.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
				022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor yang dipelihara	m²	625	1000	50.000.000	1000	75.000.000	1000	75.000.000	1000	75.000.000	1000	75.000.000	1000	350.000.000			
				024	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	Unit	20	20	90.000.000	20	165.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	855.000.000			
				028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	peralatan Kantor yang dipelihara	Unit	11	11	10.000.000	11	20.000.000	11	20.000.000	11	20.000.000	11	20.000.000	11	90.000.000			

030	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Peralatan kantor yang dipelihara	Unit	17	17	20.000.000	17	20.000.000	17	20.000.000	17	20.000.000	17	20.000.000	17	100.000.000			
047	Penyewaan Tanah/Bangunan Untuk Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang ditingkatkan	m ²	-	-	-	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	0	300.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
053	Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan (Penataan Lingkungan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis)	Jumlah paket pekerjaan pembangunan gedung kantor Pemerintahan	Lokasi	-	2	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	2	1.000.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
	Pengadaan Tanah Terminal Manganti	Luas tanah yang akan dibeli oleh pemerintah kabupaten	m ²	-	-	1.200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
	Pengadaan Tanah Terminal Banjarsari	Luas tanah yang akan dibeli oleh pemerintah kabupaten	m ²	-	-	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
	Pengadaan Tanah Terminal Cimaragas									500.000.000						500.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Orang	-	90	-	90	40.000.000	90	90.000.000	-	-	-	-	-	130.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	Stel	-	-	-	-	-	90	55.000.000	-	-	-	-	-	55.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan	Stel	-	-	-	40	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub

				005	Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	Stel	-	-	-	-	23	35.000.000	-	-	-	-	35.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub		
				05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Orang	86	-	-	90	110.000.000	90	110.000.000	90	110.000.000	90	110.000.000	90	440.000.000		DISHUB	Kantor Dishub
				001	Pendidikan dan latihan formal	Jumlah peserta diklat formal	Orang	1	-	-	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	16	120.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
				003	Bimbingan implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimtek	Orang	2	-	-	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	16	120.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
					Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perhubungan	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kualitas SDM perhubungan	Orang	-	-	-	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	250	200.000.000	Non Urusan	DISHUB	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah	Kualitas pelaporan keuangan				point	672	700		725		750		775		800		825				
			Level Maturitas SPIP				level	3	3		3		3		3		3		3				
			Nilai LHE AKIP				Poin	71,72	71,73		71,74		71,75		71,76		71,77		71,78				
				001	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100	15.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	155.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perangkat daerah	Dokumen	5	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	25	25.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub

Nilai LHE AKIP	002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	25.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
	003	Penyusunan pelaporan prognosis dan Barang realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran	Dokumen	0	1	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	20.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
	004	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	25.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
	005	Penyusunan Pelaporan Aset Barang Milik Daerah Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan barang bulanan aset BMD Lingkup Perangkat daerah	Dokumen	12	12	-	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	60	20.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
	006	Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan data dan informasi perangkat daerah	Dokumen	-	1	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	20.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
	007	Penyelenggaraan sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyelenggaraan SPIP	Dokumen	1	1	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	20.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
	07	Program Perencanaan Dan Penganggaran Kerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan RKA perangkat Daerah terhadap Rencana Kinerja perangkat daerah	%	100	100	58.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	70.000.000	100	293.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
	001	Penyusunan Rencana strategis	Jumlah Rencana Strategis Tahun 2024-2029 yang disusun	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.000.000	1	15.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub

				002	Penyusunan Perencanaan Program Dan kegiatan SKPD	Dokumen IKU, RKT, Renja, Perjanjian Kinerja	Dokumen	4	4	18.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	20	78.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
				003	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Jumlah RKA dan DPA yang disusun	Dokumen	6	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	20	200.000.000	Non Urusan	DISHUB	Kantor Dishub
Terwujudnya Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Meningkatnya sarana prasarana keselamatan lalu lintas yang etrpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase pemasangan perlengkapan jalan	19	Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah perlengkapan jalan yang dipasang dan berfungsi dengan baik	Titik	696	50	9.635.000.000	50	3.400.000.000	50	2.500.000.000	50	2.250.000.000	50	2.375.000.000	250	20.160.000.000	Perhubungan	DISHUB	
				01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu lalu lintas yang dipasang	Buah		50	50.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	100.000.000	250	375.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kabupaten Ciamis
				02	Pengadaan marka jalan	Jumlah marka jalan yang dipasang	Meter	-	-	-	500	25.000.000	500	25.000.000	500	25.000.000	500	25.000.000	2.000	100.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kabupaten Ciamis
				03	Pengadaan pagar pengaman jalan	Jumlah pagar pengaman jalan yang dipasang	Meter	-	-	-	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	400	600.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kabupaten Ciamis
				04	Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	Tersedianya Traffic dan Warning Light	Titik	-	2	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	10	900.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kabupaten Ciamis
				05	Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Berbasis ATCS	Tersedianya traffic dan warning light berbasis ATCS	Titik	-	12	9.000.000.000	-	1000000000	-	1000000000	-	1000000000	-	1000000000	12	13.000.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kecamatan Ciamis
				12	Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	Terlaksananya pemeliharaan traffic dan warning light	Titik		12	150.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	550.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kabupaten Ciamis
				14	Pelaksanaan Wahana Tata Nugraha	Laporan pelaksanaan WTN dan peningkatan tertib lalu lintas	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	50.000.000	-	-	1	50.000.000	2	100.000.000	Perhubungan	DISHUB	Ciamis, Cijeungjing
				15	Penataan Kawasan Tertib Lalu Lintas	Lokasi penataan tertib lalu lintas	Lokasi	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000	Perhubungan	DISHUB	UNIGAL, Benteng, Cikone, Panjalu, Sukam antri

				16	Peningkatan Fasilitas Peparkiran	Lokasi peningkatan fasilitas parkir	Lokasi	-	-	-	1	200.000.000	1	200.000.000	-	-	-	-	2	400.000.000	Perhubungan	DISHUB	Ciamis, Kawali
				17	Pembinaan Dan Pengawasan Juru Parkir	Jumlah juru parkir yang dibina dan diawasi	Orang	200	200	100.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	1.000	900.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kecamatan Ciamis
				18	Pengamanan lalu lintas dan angkutan jalan	Terpenuhnya pengamanan perjalanan dinas pimpinan daerah	Bulan	12	12	160.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000	12	810.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kabupaten Ciamis
				19	Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal Dan Tahun Baru	Laporan pemantuan penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Kegiatan	3	3	75.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	475.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kabupaten Ciamis
				20	Pengadaan Kendaraan Operasional Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas	Tersedianya kendaraan operasional pemeliharaan fasilitas lalu lintas	Unit	-	-	-	1	600.000.000	-	-	-	-	-	-	1	600.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kantor Dishub
				22	Rute Aman Selamat Sekolah	Terlaksananya kawasan pengadaan rute aman selamat sekolah	Lokasi	-	-	-	1	500.000.000	0	-	-	-	-	-	1	500.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kec. Ciamis, Kec. Cibeunghing, Kec. Boreg
				23	Operasionalisasi Sistem Informasi Pelayanan Perhubungan (Smart Building)	Terlaksananya kegiatan pelayanan perhubungan	Bulan	-	-	-	12	-	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	450.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kantor Dishub
					Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah penerangan jalan umum yang terpasang	Titik	6.057	689	850.000.000	60	2.000.000.000	60	1.500.000.000	60	1.500.000.000	60	1.500.000.000	929	7.350.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kabupaten Ciamis
					Pengadaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah penerangan jalan umum yang dipasang	Titik		30	250.000.000	60	500.000.000	60	500.000.000	60	500.000.000	60	500.000.000	270	2.250.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kabupaten Ciamis
					Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah PJU yang dipasang APP	Titik	689	-	-	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	1.000	2.000.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kabupaten Ciamis

			Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah PJU yang dipelihara	Titik	500	200	400.000.000	500	500.000.000	500	500.000.000	500	500.000.000	500	500.000.000	2.200	2.400.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kabupaten Ciamis
			Pengadaan Kendaraan Unit PJU	Jumlah kendaraan unit PJU	Unit	-	1	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kabupaten Ciamis
			Rencana Induk Penerangan Jalan Umum	Tersedianya dokumen penerangan jalan umum	Dokumen	-	-	-	1	500.000.000	-	-	-	-	-	-	1	500.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kabupaten Ciamis
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menciptakan keselamatan lalu lintas		21	Program Peningkatan Promosi Keselamatan LLAJ	Jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi pada promosi keselamatan LLAJ	Orang	887	681	125.000.000	681	400.000.000	681	400.000.000	681	400.000.000	681	400.000.000	3.405	1.725.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kabupaten Ciamis
		01	Penataan Ruas Jalan Rawan Kecelakaan Lalu Lintas	Terlaksananya inspeksi pada ruas jalan rawan kecelakaan	ruas	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kabupaten Ciamis
		02	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan	Jumlah pelajar yang ikut seleksi untuk pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	Orang	32	30	-	30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	150	300.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kecamatan Ciamis
		03	Pembinaan Teknis Penyuluh Keselamatan LLAJ	Jumlah peserta pembinaan teknis	Orang	55	50	-	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	250	300.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kecamatan Ciamis
		04	Sosialisasi Keselamatan LLAJ	Jumlah Peserta Sosialisasi	Orang	300	300	75.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	1.500	475.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kecamatan Ciamis
		05	Bulan Keselamatan		Orang	500	300	-	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	1.500	400.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kecamatan Ciamis
Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Prosentase layanan angkutan darat	15	Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah prasarana perhubungan (terminal, shelter dan pos pantau) dalam kondisi baik	Titik	29	32	7.419.000.000	34	3.460.000.000	36	1.560.000.000	38	1.560.000.000	40	1.660.000.000	40	15.659.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kantor Dishub

				01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana perhubungan	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	Perhubungan	DISHUB	
				02	Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Di Bidang Perhubungan	Jumlah dokumen NSKP	Dokumen	1	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kantor Dishub
				07	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Jumlah terminal yang diperbaiki	Titik	2	2	125.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	10	725.000.000	Perhubungan	DISHUB	12 terminal
				08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan	Dokumen	4	-	-	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	16	200.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kantor Dishub
				09	Pembangunan Terminal Manganti	Jumlah unit lokasi terminal yang dibangun	Lokasi	-	1	3.719.000.000	-	-	-	-	-	-	1	3.719.000.000	Perhubungan	DISHUB	Desa Sisar
				10	Pembangunan Terminal Banjarsari	Jumlah unit terminal yang dibangun	Lokasi	-	1	2.450.000.000	-	-	-	-	-	-	1	2.450.000.000	Perhubungan	DISHUB	Banjarsari
				11	Pembangunan Taman Edukasi Lalu Lintas	Jumlah taman edukasi lalu lintas yang dibangun	Lokasi	-	1	1.000.000.000	-	300.000.000	-	300.000.000	-	300.000.000	1	2.200.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kantot UPTD PKB
				12	Peningkatan Fasilitas Taman Edukasi Lalu Lintas	Paket pekerjaan fasilitas taman edukasi lalu lintas	Paket	1	-	-	1	100.000.000	1	-	1	-	1	100.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kantot UPTD PKB
				13	Pembangunan halte/shelter	Tersedianya halte	Titik	17	2	125.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	325.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kabupaten Ciamis

14	Pengadaan Fasilitas Penyeberangan	Terlaksananya pengadaan fasilitas penyeberangan orang	Titik	-	-	-	4	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	4	4.000.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kec. Ciamis, Kec. Cijeungjing, Kec. Baregbeg
15	Pengadaan Sistem Informasi Pelayanan Perhubungan	Tersedianya sistem informasi pelayanan perhubungan	Lokasi	-	-	-	-	1.800.000.000	-	-	-	-	-	-	0	1.800.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kantor Dishub
17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah izin dan pembaharuan trayek	unit	802	868	120.000.000	791	1.700.000.000	822	700.000.000	772	1.700.000.000	831	1.700.000.000	868	5.920.000.000	Perhubungan	DISHUB	
05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Lokasi pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum	Lokasi	6	6	20.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	220.000.000	Perhubungan	DISHUB	Cikone ng, Sindangkasih, Ciamis, Baregbeg, Cijeungjing, Banjarsari
15	Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Supir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Jumlah peserta pemilihan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Orang	15	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	150	250.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kecamatan Ciamis
18	Evaluasi Jaringan Trayek	Jumlah trayek yang dievaluasi	Trayek	-	-	-	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	40	80.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kabupaten Ciamis

				19	Pengawasan Operasionalisasi Terminal Di UPTD Terminal Ciamis	Laporan Jumlah keberangkatan dan kedatangan kendaraan dan penumpang di terminal dalam wilayah UPTD Terminal Ciamis	Dokumen	4	-	-	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	16	40.000.000	Perhubungan	DISHUB	Ciamis, Sindangkasih, Pamokolan, Cisaga
				20	Pengawasan Operasionalisasi Terminal Di UPTD Terminal Kawali	Laporan Jumlah keberangkatan dan kedatangan kendaraan dan penumpang di terminal dalam wilayah UPTD Terminal Kawali	Dokumen	4	-	-	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	16	40.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kawali, Rancah, Panumbangan, Panjalu, Cibeureum
				21	Pengawasan Operasionalisasi Terminal Di UPTD Terminal Banjarsari	Laporan Jumlah keberangkatan dan kedatangan kendaraan dan penumpang di terminal dalam wilayah UPTD Terminal Banjarsari	Dokumen	4	-	-	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	16	40.000.000	Perhubungan	DISHUB	Banjarsari, Cimargas, Pamarian
					Pemantauan Dan Pembinaan Perizinan Angkutan Penumpang Umum			12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	250.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kabupaten Ciamis
				22	Subsidi Angkutan Pelajar	Terlaksananya jasa angkutan bagi pelajar	Bulan	-	-	-	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	2.000.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kabupaten Ciamis
				23	Pengembangan Pelayanan Angkutan Umum Dalam Jaringan (GALENDGO: Galuh Online On The Go)	Terlaksananya jasa pelayanan angkutan penumpang umum dalam jaringan	Bulan	12	-	-	12	1.000.000.000	-	0	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	3.000.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kabupaten Ciamis

Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana LLAJ	Prosentase alat uji yang berfungsi dengan baik	16	Program rehabilitasi dan pemilihan prasarana dan fasilitas LLAJ	Jumlah alat uji yang berfungsi dengan baik	Alat	5	6	100.000.000	7	150.000.000	8	150.000.000	10	175.000.000	12	225.000.000	12	800.000.000	Perhubungan	DISHUB	
		01	Rehabilitasi pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat yang direhab/dipelihara/dikalibrasi	Alat	4	4	45.800.000	7	100.000.000	8	100.000.000	10	100.000.000	12	150.000.000	12	495.800.000	Perhubungan	DISHUB	Kabupaten Ciamis
		02	Rehabilitasi pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Jumlah lampu penerangan jalan umum yang dipelihara	Gedung	1	1	54.200.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	5	304.200.000	Perhubungan	DISHUB	Tersebar Kabupaten Ciamis
		20	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji	Unit	14.818	15.000	786.400.000	15.000	3.150.000.000	15.000	1.150.000.000	15.000	1.150.000.000	15.000	1.150.000.000	15.000	7.386.400.000	Perhubungan	DISHUB	Kabupaten Ciamis
		02	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya alat uji kendaraan bermotor	Unit	-	3	100.400.000	-	500.000.000	-	500.000.000	-	500.000.000	-	500.000.000	3	2.100.400.000	Perhubungan	DISHUB	kantor UPTD
		04	Pengawasan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Jangka waktu pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	Bulan	-	12	686.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	12	3.086.000.000	Perhubungan	DISHUB	Pamarian, Cisaga, Rancah, Rajadesa
		05	Pembangunan Gedung Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan	Terlaksananya Penyempurnaan gedung unit kendaraan bermotor	Paket	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Perhubungan	DISHUB	kantor UPTD
		06	Pengadaan Kendaraan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) keliling	Bertambahnya fasilitas alat uji kendaraan bermotor	Unit	-	-	-	1	2.000.000.000	-	0	-	-	-	-	1	2.000.000.000	Perhubungan	DISHUB	kantor UPTD

				07	Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	Jumlah bengkel umum kendaraan yang dibina dan dievaluasi	Bengkel	-	-	-	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	200.000.000	Perhubungan	DISHUB	Kabupaten Ciamis
										39.369.000		35.900.000		28.755.000		28.445.000		28.735.000		161.204.000.			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG PERHUBUNGAN

A. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Penetapan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja utama yang disusun oleh Dinas Perhubungan yaitu sebagai berikut :

Tabel VII.1
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2018)	TARGET					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya sarana prasarana keselamatan lalu lintas yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase pemasangan rambu-rambu	%	141,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Prosentase pemasangan penerangan jalan umum	%	108,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Prosentase layanan angkutan darat	%	11,48	12	12	12	12	12	12
	Prosentase jumlah terminal yang berfungsi dengan baik	%	91,67	91,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana LLAJ	Prosentase alat uji yang berfungsi	%	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah	Level Maturitas SPIP	Point	71,72	71,72	71,75	71,80	71,85	71,90	71,95
	Hasil LHE AKIP	Point	95,00	95,00	96,00	96,00	96,00	97,00	98,00
	Kualitas Laporan Keuangan	Point	3	3	3	3	3	3	3
Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	85,25	85,25	85,30	85,35	85,40	85,45	85,50

B. Indikator Kinerja Sesuai Standar Pelayanan Minimal

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

Pelayanan dasar dibidang perhubungan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
2. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
3. Fasilitas Perlengkapan Jalan
4. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
5. Sumber Daya Manusia (SDM)
6. Keselamatan

Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional.

1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota.
2. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.
3. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
4. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
5. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.
 - Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) pada jalan Kabupaten/Kota.
 - Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum (PJU)
6. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.

7. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.
8. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
9. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.
10. Tersedianya sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum.
11. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.

Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tahun pencapaian target pencapaian kinerja standar pelayanan minimal yaitu pada tahun 2016. Dan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dibandingkan dengan target SPM oleh Pemerintah.

Tabel VII.2
Target Pencapaian SPM Tahun 2019-2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET (%)					
			NASIONAL	PEMERINTAH DAERAH				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75	100	100	100	100	100
		Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	60	100	100	100	100	100
2	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100	100	100	100	100	100
		Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40	100	100	100	100	100
3	Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	60	100	100	100	100	100

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET (%)					
			NASIONAL	PEMERINTAH DAERAH				
				2020	2021	2022	2023	2024
4	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60	100	100	100	100	100
5	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	50	100	100	100	100	100
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100	100	100	100	100	100
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota	40	100	100	100	100	100
6	Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	100	100	100	100	100	100

C. Indikator Kinerja Sesuai Dokumen RPJMD

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 yang menjadi indikator kinerja program bidang perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel VII.3
Target Capaian Indikator Kinerja Program Bidang Perhubungan Tahun 2019-2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

No	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Capaian Indikator				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah prasarana perhubungan	Lokasi	29	34	36	38	40	42
2	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	Jumlah alat uji yang berfungsi	Alat	5	6	7	8	10	12
3	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah kendaraan angkutan umum yang melakukan izin dan pembaharuan trayek	Unit	802	868	791	822	772	831
4	Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah rambu-rambu yang dipasang	Buah	696	50	50	50	50	50
5	Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji	Unit	14.818	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Peningkatan Promosi Keselamatan LLAJ	Jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam promosi keselamatan LLAJ	Orang	200	200	200	200	200	200
7	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah penerangan jalan umum yang terpasang	Unit	689	30	60	60	60	60

D. Indikator Kinerja Kunci Bidang Perhubungan Tahun 2019-2024

Tabel VII.4
Target Indikator Kinerja Kunci Bidang Perhubungan Di Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

No	Indikator	Satuan	Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RJMD	Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	Jumlah penumpang yang ke terminal	7.289.950	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	35.000.000
2	Rasio izin trayek	%	Jumlah trayek/jumlah Penduduk	0,000031	0,000031	0,000031	0,000031	0,000031	0,000031	0,000031
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	Jumlah kendaraan angkutan umum yang melaksanakan pengujian	5.094	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	Jumlah kendaraan angkutan umum yang melaksanakan pengujian/Jumlah total kendaraan angkutan umum	100	100	100	100	100	100	100
5	Pemasangan rambu-rambu	Unit	Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas	650	50	50	50	50	50	250
6	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	Panjang Jalan/Jumlah kendaraan uji	0,060	0,06	0,06	0,06	0,067	0,067	0,067
7	Jumlah terminal bis	Lokasi	Jumlah terminal	2	2	3	3	3	3	3
8	Jumlah orang melalui terminal per tahun	Orang	Jumlah penumpang yang ke terminal	7.289.950	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	35.000.000
9	Persentase layanan angkutan darat	%	Jumlah Kendaraan angkutan/ jumlah penumpang yang ke terminal	11,48	12	12	12	12	12	12

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis 5 (lima) tahunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 akan digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh unsur organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Seluruh rangkaian aktivitas yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Dengan telah disepakatinya Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi internal agar ada persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas dari masing-masing unit kerja.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana strategis ini diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan muncul dikemudian hari, oleh karenanya komitmen seluruh jajaran harus dijunjung tinggi agar tujuan akhir dalam rangka mendukung masyarakat Kabupaten Ciamis yang Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua akan terwujud.

Ciamis, September 2019
Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS



Drs. ENDANG SUTRISNA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19600903 198203 1 005